

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Menurut World Health Organization (WHO), stunting diartikan sebagai tinggi badan menurut umur yang lebih dari dua standar deviasi di bawah median standar pertumbuhan anak WHO. Masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai stunting ini telah memberikan dampak-dampak.

Salah satu dampaknya adalah stunting dianggap bukanlah sebuah penyakit medis tetapi lebih ke masalah sosial. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor yaitu: Pertama, stunting sering kali tidak terlihat seperti masalah kesehatan yang mendesak karena gejalanya tidak selalu langsung terlihat. Misalnya, stunting bukanlah penyakit akut yang menimbulkan gejala dramatis, melainkan gangguan pertumbuhan yang terjadi secara perlahan dan berkelanjutan, sehingga sering diabaikan. Kedua, Stunting berkembang dalam waktu yang panjang, biasanya dimulai pada masa janin hingga usia dua tahun. Karena efeknya tidak langsung terlihat dan terjadi perlahan-lahan, masalah ini sering kali tidak disadari sampai anak menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang terganggu, seperti perawakan pendek atau keterlambatan perkembangan kognitif. Hal ini membuat stunting tidak tampak seperti masalah darurat kesehatan, dibandingkan dengan penyakit yang menunjukkan gejala akut. Ketiga, perawakan pendek atau anak yang terlihat kecil mungkin dianggap normal atau hanya bagian dari faktor genetik, bukan karena malnutrisi atau masalah kesehatan. Dengan kata lain, stunting bisa diabaikan karena dianggap sebagai ciri khas keluarga atau populasi tertentu, tanpa disadari bahwa penyebab utamanya adalah kekurangan gizi kronis. Ketiga faktor yang menjadi penyebab dari adanya dampak bahwa stunting bukanlah masalah kesehatan tetapi adalah masalah sosial membutuhkan strategi-strategi sosial dalam penyelesaiannya.

Di Indonesia, prevalensi stunting masih menjadi perhatian yang signifikan. Apabila merujuk pada dua data berikut: Pertama, berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, prevalensi stunting nasional mencapai 30,8%, yang berarti hampir satu dari tiga anak di Indonesia mengalami stunting. Hal ini menunjukkan bahwa stunting adalah masalah yang mendesak untuk ditangani secara serius oleh semua pihak terkait. Kedua, berdasarkan informasi yang diberikan oleh Annur (Katadata, 2023) bahwa stunting atau ukuran badan pendek merupakan salah satu masalah gizi yang menjadi perhatian pemerintah dan publik karena prevalensinya kini masih cukup tinggi, mencapai 21,6% pada 2022. Meskipun prevalensi stunting telah menurun dari tahun sebelumnya, target prevalensi stunting yang ditentukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 adalah 14% (Peraturan Presiden RI, 2020). Ini mengindikasikan bahwa *stunting* di Indonesia masih tergolong kronis. Dari dua data tersebut, telah terjadi penurunan prevalensi sekitar 9% dari tahun 2018 ke tahun 2022 tetapi walaupun demikian sebagaimana yang dikatakan oleh Annur bahwa angkanya masih cukup tinggi dikarenakan melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh RPJMN sebesar 14%.

Motif penetapan 14% sebagai standar batas pravelensi stunting di Indonesia, maka ini dapat dilihat pada dua motif: Pertama, Komitmen Indonesia dalam menyukseskan SDGS. Salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) adalah memastikan kesehatan dan kesejahteraan yang baik bagi semua (SDG 3). Menurunkan angka stunting menjadi 14% sejalan dengan upaya global untuk mengurangi masalah malnutrisi secara signifikan, yang mempengaruhi perkembangan fisik dan kognitif anak-anak. Kedua, Rekomendasi WHO. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan target penurunan stunting global agar prevalensi stunting di bawah 20% dianggap sudah rendah. Target 14% menunjukkan ambisi nasional yang lebih besar dalam mengurangi angka stunting lebih jauh di bawah ambang batas itu, menjadikan upaya Indonesia sejalan dengan standar internasional dan membuktikan komitmen terhadap kesehatan anak.

Upaya pemerintah Republik Indonesia ini dapat dibagi dalam tiga tahap yaitu: Pertama, tahap pencegahan. pada tahap ini, pemerintah melakukan upaya strategis seperti peningkatan gizi ibu hamil dan menyusui, pemberian asi eksklusif, pemberian makanan pendamping asi (mpasi) yang tepat, pemantauan dan intervensi pertumbuhan anak, pendidikan gizi bagi keluarga dan masyarakat, akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, perbaikan sanitasi dan akses air bersih, penanganan penyakit infeksi, intervensi di bidang sosial dan ekonomi seperti memberikan bantuan pangan. kedua, tahap penanganan. pada tahap ini strategi pemerintah antara lain intervensi gizi spesifik yang berfokus pada pemberian suplemen mikronutrien dan suplemen zat besi dan asam folat untuk ibu hamil, penanganan dan pencegahan penyakit infeksi, pemberdayaan dan edukasi keluarga, dan peningkatan akses ke layanan kesehatan dan gizi. ketiga, tahap penanggulangan. peningkatan gizi ibu hamil dan menyusui, peningkatan asupan gizi pada anak, peningkatan akses layanan kesehatan dan pemantauan pertumbuhan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Secara nasional, terdapat grafik penurunan stunting di Indonesia. stunting telah menurun dari angka 24,4% ke 21,6% per tahun 2022. Data tersebut disampaikan oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia (SSGI). Berdasarkan data tersebut Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan menargetkan tahun 2023 angka stunting turun 17%.

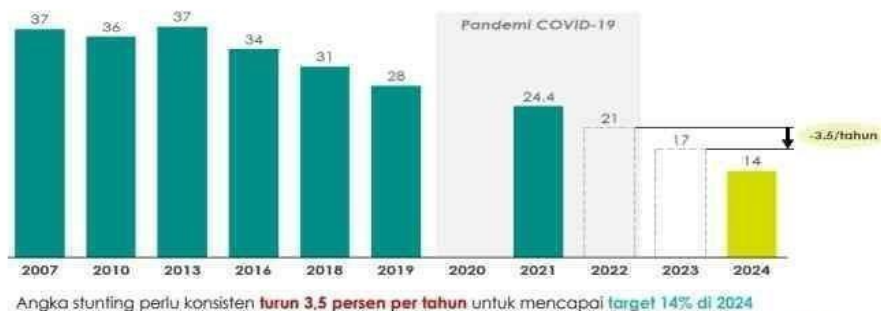
Komitmen Pemerintah Republik Indonesia pun semakin terlihat dari lahirnya berbagai regulasi-regulasi yang berkaitan dengan upaya penurunan stunting, antara lain:

- Peraturan Presiden (Perpres) No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan ini menetapkan kebijakan nasional terkait percepatan penurunan stunting melalui koordinasi lintas sektor dan penetapan target nasional.
- Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Mencakup upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak serta penguatan deteksi dini stunting di tingkat keluarga.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Mengatur pelaksanaan gerakan nasional yang menitikberatkan pada upaya perbaikan gizi, termasuk pencegahan dan penanggulangan stunting.
- Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Instruksi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat yang turut berdampak pada pengurangan angka stunting.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Mengatur tentang upaya kesehatan masyarakat, termasuk pemenuhan gizi yang baik bagi ibu hamil dan anak untuk mencegah stunting.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Salah satu prioritasnya adalah penggunaan dana desa untuk program-program yang mendukung pencegahan stunting di tingkat desa.
- Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/578/2020 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024. Dokumen ini menetapkan langkah-langkah strategis dan peta jalan percepatan penurunan stunting di Indonesia dalam kurun waktu tersebut.
- Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi. Mengatur kebijakan terkait pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat sebagai upaya untuk mencegah malnutrisi, termasuk stunting.

Gambar 1.1 Penurunan Stunting

Stunting menurun, namun perlu percepatan untuk mencapai target 14% di tahun 2024

% Angka stunting 2007-2021 dan target 2024:



Sumber: Bawasda 2007, 2010, 2013, 2016, 2018 dan SSGI tahun 2019 dan 2021



Sumber: Abdur-Rabb, A. F., Syam, S. F., & Idris, M. (2024).

Pada tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sulawesi Selatan (Sulsel) menargetkan bisa menekan angka stunting 23,8 persen tahun 2024. Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan RI menunjukkan prevalensi stunting di Sulsel saat ini masih berada diangka 27,2 persen (infomakassar.id, 2024). Provinsi ini menduduki peringkat ke-10 prevalensi balita *stunting* tertinggi di Indonesia. Sulawesi Selatan memangkas tipis angka balita *stunting* sebesar 0,2 poin dari tahun sebelumnya. Pada 2021, tercatat prevalensi balita *stunting* di provinsi ini sebesar 27,4%. Sedangkan data alternatif yang ditampilkan pada sebaran stunting yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri di website aksi.bangda.kemendagri.go.id yang memperlihatkan terjadi penurunan persentase kasus stunting di rentang waktu 2022-2024.

Tabel 1.1 Sebaran Stunting Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun	Jumlah Balita	Stunting		Persentase Kasus Stunting
		Pendek	Sangat Pendek	
2022	584,481	40,582	12,241	9.0
2023	594,685	37,464	11,180	8.2
2024	564,938	30,222	10,969	7.3

Sumber: Abdur-Rabb, A. F., Syam, S. F., & Idris, M. (2024).

Pada tingkat Kota Makassar terdapat dua klaim yang berbeda berdasarkan dua rujukan data

yang berbeda pula. Pertama, dilansir dari SulselSatu.com (2024) angka prevalensi stunting di Kota Makassar menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam setahun terakhir. Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi stunting di Kota Makassar meningkat dari 18,04% pada tahun 2023 menjadi 25,6% di Juni 2024. Kedua, dilansir dari Antaranews.com (2024) berdasarkan data dari survei elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi berbasis Masyarakat (EPPGBM) per Februari 2024 naik menjadi 3,29% dari yang sebelumnya 3,14% pada akhir 2023. Sedangkan pada sebaran stunting (tabel 1.2) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri di website aksi.bangda.kemendagri.go.id memperlihatkan bahwa terjadi penurunan persentase kasus stunting di Kota Makassar dalam rentang waktu 2022-2024.

Tabel 1.2 Sebaran Stunting Kota Makassar

Tahun	Jumlah Balita	Stunting		Persentase Kasus Stunting
		Pendek	Sangat Pendek	
2022	87.251	2,849	693	4,06
2023	89.443	2,003	805	3,14
2024	91.053	2,199	797	3.29

Sumber: Dinkes Kota Makassar Juni 2024 (e-PPGBM)

Tabel 1.3 Angka Stunting Kota Makassar

Tahun	Jumlah Balita	Persentase Kasus Stunting
2021	116.269	18,8 %
2022	87.251	18,04 %
2023	89.443	25,6 %

Sumber: Dinkes Kota Makassar 2023 (SKI)

Pemerintah Kota Makassar dalam upayanya untuk mengentaskan stunting di Kota Makassar kemudian melakukan berbagai gebrakan program dan kebijakan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar adalah terbitnya peraturan walikota tentang percepatan penurunan stunting dan memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi OPD adalah Peraturan Walikota Makassar Nomor : 96 Tahun 2023 Tentang Konvergensi Percepatan Pencegahan Dan Penurunan Stunting.

Dengan adanya Perwali tersebut kemudian menjadi landasan untuk mencetuskan berbagai program yang berkaitan dengan penurunan stunting seperti: pembinaan dalam penurunan stunting, pelatihan konseling pemberian makanan pada Bayi dan Anak (PMBA), melakukan pelatihan bagi kader TPK terkait pendampingan bagi keluarga yang memiliki balita, ibu hamil, ibu menyusui dan calon pengantin, Program DAHSAT (Dapur Sehat Atasi Stunting), Grebek Stunting, dan optimalisasi Kampung KB sebagai wadah pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga.

Salah satu kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah adalah program pemberian makanan tambahan bagi anak-anak yang mengalami stunting. Program ini bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak yang rentan mengalami stunting, sehingga pertumbuhan dan perkembangan mereka dapat optimal. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan kepada keluarga yang memiliki anak dengan stunting melalui program bantuan sosial dan pendidikan tentang pola makan yang sehat. Selain program pemberian makanan tambahan, pemerintah juga telah mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Hal ini dilakukan dengan memperluas jaringan puskesmas dan rumah sakit di berbagai daerah, serta meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan yang terlatih dalam menangani masalah gizi dan stunting. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan untuk mencegah dan mengatasi stunting.

Selain kebijakan yang bersifat preventif, pemerintah juga telah mengimplementasikan kebijakan rehabilitatif untuk membantu anak-anak yang mengalami stunting. Program rehabilitasi gizi dan kesehatan telah diterapkan di berbagai pusat kesehatan, dimana anak-anak yang mengalami stunting dapat mendapatkan perawatan dan pemantauan secara intensif. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan kepada keluarga dalam mengelola masalah gizi dan stunting yang dialami oleh anak-anak mereka.

Pentingnya penanganan masalah stunting di Kota Makassar tidak bisa dipandang sebelah mata. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya. Koordinasi yang baik antar organisasi perangkat daerah juga perlu ditingkatkan agar upaya penanggulangan stunting dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Upaya penanggulangan stunting di Kota Makassar harus menjadi prioritas utama bagi semua pihak terkait.

Diperlukan langkah-langkah konkret dan terukur untuk menekan angka stunting yang masih tinggi. Peran serta aktif dari semua pihak, termasuk masyarakat, juga sangat diperlukan dalam upaya ini.

Pemerintah juga telah bekerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi internasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi yang seimbang. Program edukasi dan sosialisasi tentang gizi seimbang telah dilakukan di berbagai sekolah dan masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya menerapkan pola makan yang sehat dan seimbang. Selain itu, pemerintah juga mengadakan kampanye-kampanye kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya stunting dan pentingnya pencegahannya. Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *United Nations Children's Fund* (UNICEF), Pentahelix Institute, dan Kader Posyandu.

Kota Makassar sebagai kota yang menjadi barometer kemajuan pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia wilayah timur Indonesia dengan tingkat stunting yang masih tinggi tentu meninggalkan sebuah pertanyaan mendasar yaitu mengapa masyarakat Kota Makassar masih rentang mengalami stunting.

Tabel 1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	IPM
2022	5,40%	83,12
2023	5,31%	84,85

Sumber: Makassar Dalam Angka 2023 dan 2024

Apabila ditelisik secara kesejahteraan masyarakatnya, menurut Makassar Dalam Angka 2023 pendapatan masyarakat di Kota Makassar menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir, sejalan dengan pertumbuhannya. Pada 2022, ekonomi Kota Makassar tumbuh sebesar 5,40%, melampaui angka pertumbuhan provinsi Sulawesi Selatan (5,09%) dan nasional (5,31%). Pertumbuhan ini didukung oleh sektor-sektor dominan seperti perdagangan, industri, dan konstruksi. Selain itu, tingkat kemiskinan di kota ini menurun dari 74.690 orang pada 2021 menjadi 71.830 orang pada 2022, mencerminkan perbaikan kesejahteraan. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi komponen terbesar yang menopang ekonomi Makassar, menyumbang sekitar 51,2% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota.

Selain itu, Makassar memiliki potensi besar di berbagai sektor ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan di masa depan. Secara keseluruhan, pendapatan penduduk di Makassar cukup bervariasi, tetapi peningkatan kesejahteraan terus terlihat, terutama dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya daya beli masyarakat. Dan menurut Makassar dalam Angka 2024, hasil dari SUSENAS Maret 2022 menunjukkan garis kemiskinan Kota Makassar berada pada angka Rp. 511.081 dengan persentase penduduk miskin sebesar 4,58 persen. IPM 2022 sebesar 83,12 dengan pertumbuhan 0,56 persen.

Kota Makassar meraih ranking pertama se Sulawesi Selatan. Hasil dari SUSENAS Maret 2023 menunjukkan garis kemiskinan Kota Makassar berada pada angka Rp 570.286 dengan persentase penduduk miskin sebesar 5,07 persen. IPM 2023 sebesar 84,85 dengan pertumbuhan 0,47 persen. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor ekonomi bukanlah faktor yang dominan menyebabkan masyarakat Kota Makassar mengalami stunting. Berarti ada faktor yang lain yang menyebabkan penduduk Kota Makassar mengalami stunting, salah satunya adalah pengetahuan.

Pengetahuan merupakan salah satu faktor utama terjadinya gangguan gizi, disamping kemiskinan, lingkungan, ketersediaan pangan, dan ketersediaan akses kesehatan. Penelitian yang

dilakukan oleh Chaerunnisa dkk (2022) menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan ibu mengenai gizi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya stunting pada anak balita.

Pengetahuan mengenai gizi merupakan proses awal dalam perubahan perilaku peningkatan status gizi, sehingga pengetahuan merupakan faktor internal yang mempengaruhi perubahan perilaku. Pengetahuan ibu tentang gizi akan menentukan perilaku ibu dalam menyediakan makanan untuk anaknya. Ibu dengan pengetahuan gizi yang baik dapat menyediakan makanan dengan jenis dan jumlah yang tepat untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak balita. Hasil penelitian serupa dikemukakan oleh Arnita dkk (2020) bahwa sebagian besar (71.9%) Ibu berpengetahuan tinggi memiliki upaya pencegahan baik. Jika Ibu memiliki pengetahuan tinggi tentang pengertian, gejala, akibat terjadinya stunting, dan pencegahan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), maka semakin baik pula pengetahuan tentang upaya pencegahan stunting.

Selain itu menurut Arnita dkk (2020) sebagian besar (76.8%) Ibu yang mempunyai sikap baik memiliki upaya pencegahan. Sehingga dapat diartikan bahwa pengetahuan yang tinggi didukung dengan sikap yang baik akan tercermin perilaku positif. Sehingga dapat diartikan pengetahuan tinggi dengan sikap yang baik dapat diwujudkan dalam upaya pencegahan yang baik. Penelitian yang dilakukan oleh Chaerunnisa dkk (2022) dan Arnita dkk (2020) ini sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan Ramdhani (2020) bahwa berdasarkan hasil telaah jurnal sebanyak 10 artikel, yang membahas tentang hubungan pengetahuan ibu dengan kejadian stunting menunjukkan sebagian besar pengetahuan ibu tentang stunting kurang. Kurang baiknya pengetahuan ibu tentang stunting salah satunya kurangnya informasi sangat memengaruhi tingkat pengetahuan ibu. Penyebab lain kurangnya pengetahuan ibu tentang stunting adalah karena tidak semua ibu balita melakukan kunjungan ke Posyandu.

Secara sosiologis, pengetahuan mempunyai pembahasannya tersendiri. Pengetahuan merujuk pada cara masyarakat mengembangkan, mendistribusikan, dan memvalidasi apa yang mereka anggap sebagai "benar" atau "realitas". Pengetahuan dalam sosiologi tidak dianggap sebagai sesuatu yang netral atau sepenuhnya objektif, melainkan sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh konteks budaya, ekonomi, sejarah, dan politik. Dua pemikir sosiologi yang membahas mengenai pengetahuan adalah Pertama, Michel Foucault adalah pemikir sosiologis kontemporer yang membahas mengenai relasi kekuasaan dengan pengetahuan pada masyarakat yang mengalami pendisiplinan. Kedua, Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam "*The Social Construction of Reality*", menegaskan bahwa realitas dibentuk oleh proses sosial dan komunikasi manusia. Mereka menyatakan bahwa masyarakat menciptakan realitas melalui institusi dan rutinitas sehari-hari, yang kemudian dianggap sebagai kebenaran objektif.

Pemikiran *power-knowledge* (kekuasaan-pengetahuan) dari Michel Foucault (2002) merupakan salah satu konsep sentral dalam teorinya mengenai kekuasaan dan bagaimana kekuasaan bekerja di dalam masyarakat. Foucault berpendapat bahwa kekuasaan dan pengetahuan tidak dapat dipisahkan; satu memengaruhi yang lain. Kekuasaan tidak hanya bekerja melalui paksaan fisik atau hukum, tetapi juga melalui kontrol terhadap pengetahuan. Ketika seseorang atau kelompok memiliki kontrol atas produksi dan distribusi pengetahuan, mereka juga mendapatkan kekuasaan untuk mendefinisikan kebenaran, norma, dan perilaku yang dianggap wajar. Sebaliknya, pengetahuan yang dihasilkan seringkali merefleksikan struktur kekuasaan yang ada.

Foucault memperkenalkan konsep *diskursus*, yakni cara bicara atau cara berpikir yang memengaruhi bagaimana pengetahuan dihasilkan dan disebarkan dalam masyarakat. Diskursus tidak netral, melainkan dibentuk oleh kekuasaan. Melalui diskursus, masyarakat diberitahu apa yang dianggap sebagai "kebenaran" dan apa yang tidak, serta bagaimana individu diharapkan untuk bertindak atau berpikir dalam konteks tertentu. Kekuasaan-pengetahuan juga bekerja melalui mekanisme normalisasi. Foucault menunjukkan bahwa individu dalam masyarakat modern

dikendalikan bukan melalui kekerasan atau paksaan langsung, tetapi melalui norma-norma yang "membentuk" cara berpikir dan berperilaku.

Kekuasaan modern bersifat disipliner, di mana individu dibentuk melalui pengawasan (*surveillance*) dan pelatihan agar sesuai dengan norma yang ditetapkan. Pengetahuan tentang "normal" atau "abnormal" diproduksi melalui institusi seperti sekolah, rumah sakit, atau penjara, yang kemudian menjadi alat kekuasaan untuk mengatur kehidupan sehari-hari.

Kebenaran sebagai sebuah produk praktik dan institusi sosial sebagai sebuah produk praktik dan institusi sosial yang berwujud sebagai sebuah sistem yang berisi prosedur teratur untuk meregulasi, mendistribusi, memproduksi, dan mengoperasikan sebuah pernyataan. Selain itu, kebenaran berkaitan dengan kekuasaan yang menyebabkan hubungan keduanya berbentuk sebuah siklus. Kebenaran memproduksi dan melanggengkan *power*, sebuah rezim kebenaran menurutnya. Kebenaran bergantung terhadap relasi kuasa, dan risetnya mengenai kebenaran memproduksi apa yang disebut sebagai *discourse* (wacana), dalam penafsirannya, *discourse* adalah sebuah instrumen untuk memikirkan dan membicarakan realita dunia dengan menggunakan pernyataan-pernyataan yang akan menghasilkan sebuah pengertian mengenai realita.

Seperti substansinya yaitu kebenaran, *discourse* memiliki hubungan yang erat dengan relasi kuasa. Namun, perlu diingat bahwasanya yang dimaksud oleh Foucault adalah *discourse* adalah Sistem pemikiran, bahasa, praktik, dan pengetahuan yang membentuk cara kita melihat dan berbicara tentang realitas. *Knowledge* (Ilmu) menurutnya berbeda dengan penafsiran para intelektual sebelumnya, *knowledge* yakni adalah hasil dari relasi kuasa, maka dengan itu *knowledge* tidak bersifat netral dan objektif, melainkan subjektif dan berpihak pada entitas yang memiliki relasi kuasa yang kuat. *Knowledge* pula dalam sifatnya yang tidak objektif dan netral- berlandas dari konteks historis dan sosial yang bergantung pada relasi kuasa. Dapat dimengerti keempat konsep tersebut seperti ini: *Discourse* adalah alat untuk memproduksi *knowledge* yang berkesinambungan dengan kebenaran (*truth*), yang ketiganya dipengaruhi oleh *power* dan relasinya. *Power* menghasilkan *knowledge*, dan *knowledge* menjustifikasi keberadaan *power* itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, penulis kemudian mengajukan disertasi yang berjudul "Relasi Kuasa dalam Praktik penanganan stunting di Kota Makassar.

1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai relasi kuasa (*power relations*) dalam konteks stunting biasanya membahas bagaimana distribusi kekuasaan, kontrol sumber daya, dan pengambilan keputusan dapat memengaruhi kesehatan dan gizi anak, khususnya dalam kasus stunting. Relasi kuasa dalam keluarga, masyarakat, dan institusi yang lebih besar memainkan peran penting dalam akses terhadap layanan kesehatan, sumber daya pangan, serta pengetahuan tentang gizi dan kesehatan. Adapun penelitian terdahulu yang membahas mengenai relasi kuasa pada praktik penanganan stunting antara lain:

- Nanda, dkk (2021) dengan judul penelitian "Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting pada Balita di Kota Makassar". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting pada balita di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi, Kota Makassar, tahun 2021. Penelitian menggunakan pendekatan *cross-sectional* dengan melibatkan 52 balita sebagai sampel. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang menilai tiga variabel utama: pengetahuan ibu, pemberian ASI eksklusif, dan pola asuh. Pengolahan data dilakukan menggunakan program SPSS dengan uji Chi-Square. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan ibu dan pola asuh tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian stunting, namun pemberian ASI eksklusif menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kejadian stunting. Terdapat tiga poin yang menjadi kekurangan pada penelitian ini yaitu: Pertama, penelitian ini hanya melibatkan 52 responden, yang relatif kecil untuk mendapatkan hasil yang dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih

luas. Ukuran sampel yang kecil dapat membatasi kekuatan statistik dan validitas eksternal penelitian. Kedua, studi ini menggunakan pendekatan *cross-sectional*, yang hanya mengamati hubungan antar variabel pada satu titik waktu. Hal ini membatasi kemampuan penelitian untuk menyimpulkan hubungan sebab-akibat antara variabel. Ketiga, penelitian ini hanya menilai tiga faktor (pengetahuan ibu, ASI eksklusif, dan pola asuh), tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti akses terhadap layanan kesehatan, status sosial-ekonomi, kondisi lingkungan, atau penyakit infeksi yang juga diketahui berperan penting dalam stunting.

- Teguh, dkk (2023) dengan penelitian berjudul *“Bio-Power Reproduction by Authority Agents and Apparatuses of Power in Health Communication: The Analysis of Health Cadre Discourse as Stunting Cases Preventive Health Care Agent”*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana reproduksi bio-power dilakukan oleh kader kesehatan sebagai agen komunikasi dalam program pencegahan stunting di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, menggunakan analisis diskursus berdasarkan konsep Michel Foucault. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan kunci seperti kader kesehatan, ibu, dan pengasuh balita, serta studi dokumen. Analisis dilakukan menggunakan metode analisis diskursus berdasarkan konsep bio-power Foucault, di mana fokusnya pada reproduksi kekuasaan melalui komunikasi kesehatan.

Hasil dari penelitian ini adalah Kader kesehatan memainkan peran penting dalam reproduksi bio-power sebagai agen yang mendistribusikan pengetahuan stunting, meskipun terdapat beberapa hambatan dalam penyampaian pesan kesehatan kepada masyarakat. Hasil pada penelitian ini adalah penggunaan pendekatan yang lebih personal oleh kader kesehatan menjadi kunci keberhasilan dalam pencegahan stunting. Kader kesehatan berperan sebagai agen yang mendistribusikan pengetahuan tentang stunting kepada masyarakat, khususnya ibu dan pengasuh balita. Pengetahuan ini awalnya didapatkan dari pemerintah daerah dan pusat, kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kesehatan. Kekurangan dari penelitian ini adalah pendekatan Foucaultian menawarkan wawasan yang mendalam tentang kekuasaan dan pengendalian, fokus yang terlalu berat pada teori ini dapat membatasi pemahaman praktis yang lebih konkret tentang cara kerja program kesehatan di lapangan dan penggunaan teori yang lebih luas dan aplikatif mungkin akan memberikan perspektif yang lebih seimbang.

- Teguh, dkk (2023) dengan penelitian berjudul *“The Roles of Elders as Apparatuses of Power in Health Communication for Stunting Prevention”*. Penelitian ini bertujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran para lansia sebagai tokoh otoritas dalam komunikasi kesehatan untuk mencegah stunting di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Program "Kenek Beraksi" yang melibatkan lansia sebagai komunikator kesehatan dilaksanakan di daerah ini untuk mendistribusikan pengetahuan tentang nutrisi kepada ibu hamil dan anak-anak balita. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Informan utama adalah kepala pusat kesehatan, ahli gizi, seorang lansia, dan seorang ibu.

Penelitian menunjukkan bahwa lansia memainkan peran penting dalam komunikasi kesehatan di Trenggalek. Para lansia dianggap sebagai figur otoritatif yang dihormati dan dipercaya, sehingga dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam hal kesehatan. Partisipasi mereka dalam program kesehatan menghasilkan penurunan jumlah ibu hamil yang mengalami anemia, peningkatan pemenuhan gizi balita, dan penurunan angka stunting. Adapun kekurangan pada penelitian ini beberapa poin yaitu Pertama, penelitian terlalu menekankan peran lansia tanpa meneliti peran tokoh masyarakat lain atau anggota keluarga yang mungkin juga memiliki pengaruh kuat dalam menyampaikan pesan kesehatan, seperti ayah, ibu, atau

pemimpin masyarakat. Kedua, meskipun penelitian ini kualitatif, akan lebih kuat jika disertai dengan data kuantitatif yang lebih mendalam terkait angka penurunan stunting di berbagai periode, serta analisis statistik untuk memperkuat klaim yang dibuat.

- Hartono, dkk (2022) dengan penelitian berjudul “Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang Gizi dengan Asupan Energi pada Anak Stunting”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan ibu tentang gizi dengan asupan energi pada anak stunting. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode survei, dilakukan pada 26 siswa kelas III dan IV yang mengalami stunting di SD Inpres Sengka, Kabupaten Gowa. Data diperoleh dari wawancara langsung dengan ibu siswa mengenai pengetahuan gizi dan dari metode *food recall* 2x24 jam untuk mengetahui asupan energi anak.

Hasil dari penelitian ini antara lain: Pertama, sebagian besar ibu memiliki pengetahuan tentang gizi yang kurang. Kedua, mayoritas anak stunting memiliki asupan energi yang rendah. Ketiga, tidak ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan gizi ibu dengan asupan energi anak stunting. Adapun kekurangan pada penelitian ini antara lain: Pertama, sampel penelitian terbatas hanya pada 26 siswa di satu sekolah, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi untuk populasi yang lebih luas. Penelitian di lebih banyak sekolah atau wilayah lain mungkin memberikan hasil yang lebih representatif. Kedua, penelitian ini fokus pada pengetahuan ibu dan asupan energi, namun tidak mempertimbangkan faktor lain yang berperan dalam stunting, seperti sanitasi, pola asuh, dan status ekonomi keluarga, yang juga berpengaruh signifikan. Ketiga, penelitian ini tidak mendalami alasan mengapa banyak ibu memiliki pengetahuan gizi yang rendah. Informasi lebih lanjut mengenai hambatan pendidikan atau sumber informasi yang dapat diakses oleh para ibu mungkin akan memberikan wawasan lebih untuk perbaikan ke depan.

- Rusliadi & Asri Nur Aina (2024) dengan penelitian berjudul *Poverty Alleviation Social Policy and Cross-Sectoral Participation in Overcoming Stunting in Indonesia*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan sosial pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan partisipasi lintas sektor dalam menangani masalah stunting di Kabupaten Bantaeng, Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Kabupaten Bantaeng, salah satu daerah yang berhasil menurunkan angka stunting. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi literatur. Analisis data menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Pro untuk menyusun dan memvisualisasikan hasil penelitian.

Hasil pada penelitian ini terbagi menjadi tiga poin yaitu Pertama, kebijakan sosial pemerintah: Kebijakan pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui program-program seperti *Keluarga Harapan* dan bantuan pangan non-tunai memberikan dampak positif pada penurunan angka stunting. Kebijakan ini membantu masyarakat meningkatkan asupan gizi dan memperbaiki kesejahteraan sosial. Kedua, partisipasi lintas sektor: Di Kabupaten Bantaeng, partisipasi lintas sektor dalam penanganan stunting berjalan dengan baik, melibatkan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan bahkan TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang berkontribusi dalam program bapak asuh untuk anak stunting. Namun, keterlibatan sektor swasta masih minim. Ketiga, pengaruh program pada stunting: Pada 2022, prevalensi stunting di Kabupaten Bantaeng menurun signifikan dari 14,19% pada 2021 menjadi 5,84%. Hal ini menunjukkan efektivitas kebijakan pemerintah dan partisipasi lintas sektor dalam mengatasi masalah stunting. Terdapat kekurangan pada penelitian ini yaitu: Pertama, penelitian ini mengidentifikasi peran sektor swasta yang minim dalam penanganan stunting, tetapi tidak menjelaskan secara mendalam mengapa partisipasi sektor swasta kurang atau langkah-langkah yang bisa diambil untuk mendorong keterlibatan mereka. Kedua, penelitian ini sangat fokus pada kebijakan pemerintah dan peran lintas sektor dalam

penanganan stunting, tetapi kurang memberikan ruang untuk menganalisis solusi alternatif yang mungkin berasal dari masyarakat lokal atau sektor swasta yang dapat memberikan dampak yang lebih luas.

1.3 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana peran dari masing-masing stakeholder dalam praktik penanganan stunting di Puskesmas yang terdapat di Kota Makassar?
- b. Bagaimana relasi kuasa dalam praktik penanganan stunting di Puskesmas Kota Makassar?

1.4 Tujuan Penelitian

- a) Mengklasifikasi peran setiap stakeholder yang berperan dalam praktik penanganan stunting di Kota Makassar.
- b) Menganalisis relasi kuasa dalam praktik penanganan stunting di Kota Makassar.

1.5 Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori tentang relasi kekuasaan dalam konteks kesehatan, khususnya dalam penanganan stunting. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana relasi kekuasaan mempengaruhi pelaksanaan program kesehatan dan bagaimana dinamika relasi kekuasaan dapat mempengaruhi efektivitas program tersebut. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori tentang penanganan stunting dan bagaimana kebijakan dan program yang ada dapat dioptimalkan untuk mengurangi prevalensi stunting.
- b. Kegunaan Pragmatis. Secara pragmatis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi Puskesmas Kota Makassar dan pihak terkait lainnya dalam meningkatkan efektivitas program pemulihan stunting. Rekomendasi ini meliputi strategi untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang ada, strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dan strategi untuk meningkatkan koordinasi antar pihak terkait. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana relasi kekuasaan dapat digunakan secara konstruktif untuk meningkatkan efektivitas program pemulihan stunting.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian.

Ruang lingkup dalam penelitian relasi kuasa pada praktik penanganan stunting mencakup berbagai aspek yang terkait dengan bagaimana kekuasaan beroperasi, didistribusikan, dan dipertahankan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam penanganan stunting. Ruang lingkup ini bisa dibagi ke dalam beberapa dimensi yang berfokus pada aspek struktural, sosial, politik, ekonomi, dan kultural dalam proses pemulihan stunting. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai ruang lingkup tersebut:

- a) Aktor-Aktor dalam Relasi Kuasa. Ruang lingkup penelitian mencakup identifikasi aktor-aktor utama yang memiliki peran dalam pemulihan stunting serta dinamika kekuasaan di antara mereka. Aktor ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok, yaitu: Kelompok Pemerintah: Baik tingkat nasional maupun lokal, pemerintah biasanya memiliki wewenang dalam merancang kebijakan kesehatan publik, alokasi anggaran, serta implementasi program intervensi stunting. Organisasi Internasional dan Donor: Kelompok Organisasi seperti UNICEF, WHO, lembaga donor internasional sering terlibat dalam pendanaan dan memberikan panduan tentang intervensi gizi. Mereka memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan yang diadopsi oleh negara-negara penerima bantuan. Lembaga

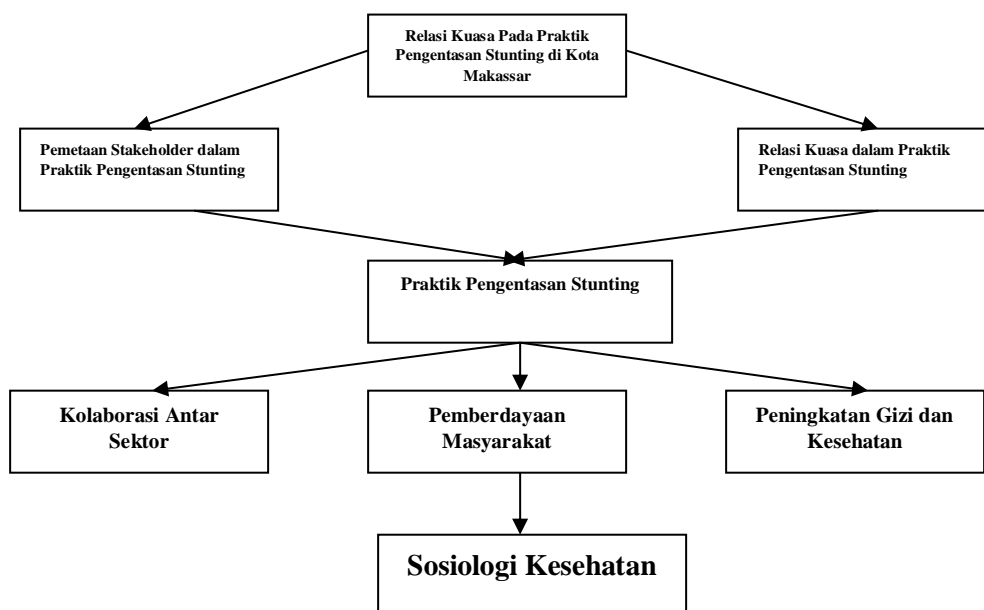
Swadaya Masyarakat (LSM): LSM lokal dan internasional sering kali terlibat dalam pelaksanaan intervensi dan advokasi, sehingga memegang peran dalam relasi kuasa yang membentuk program pemulihan.

- b) Tenaga Kesehatan: Dokter, ahli gizi, perawat, dan tenaga kesehatan komunitas adalah aktor penting dalam pelaksanaan program pemulihan stunting. Relasi kuasa antara mereka dengan keluarga yang terdampak menjadi salah satu fokus utama dalam penelitian.
- c) Komunitas Lokal: Termasuk keluarga, masyarakat setempat, tokoh agama, dan pemimpin adat, yang memiliki pengetahuan dan praktik lokal terkait gizi dan kesehatan anak.
- d) Kebijakan dan Program Intervensi. Penelitian dapat mengkaji kebijakan nasional atau lokal yang terkait dengan pemulihan stunting, serta bagaimana kebijakan ini dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi.
- e) Wacana dan Narasi Kekuasaan.. Ruang lingkup lain yang penting adalah bagaimana wacana (diskursus) tentang stunting dibentuk dan digunakan oleh berbagai aktor, serta bagaimana narasi ini menciptakan atau mengukuhkan relasi kuasa.
- f) Peran Kultural dan Pengetahuan Lokal. Budaya lokal dan pengetahuan tradisional juga memainkan peran penting dalam praktik penanganan stunting.

1.7 Kerangka Pikir

Kerangka konseptual adalah suatu gambaran atau model abstrak yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara konsep-konsep utama dalam sebuah penelitian. Kerangka ini berfungsi sebagai panduan teoritis yang membantu peneliti memahami dan menjelaskan fenomena yang sedang diteliti.

1.2 Gambar Kerangka Pikir



Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi yang tidak memadai, terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan (dari masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun). Di Indonesia, stunting menjadi salah satu masalah kesehatan yang mendesak untuk diatasi, termasuk di Kota Makassar. Makassar, sebagai kota

besar di Sulawesi Selatan, menghadapi masalah stunting yang cukup signifikan. Berdasarkan laporan dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat, prevalensi stunting di Makassar tergolong cukup tinggi meskipun sudah terjadi penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah kota telah melakukan berbagai upaya intervensi untuk menekan angka stunting, namun tantangan-tantangan sosial dan ekonomi masih memperlambat proses penurunan prevalensi tersebut.

Salah satu tantangan dalam praktik penanganan stunting di Makassar adalah ketimpangan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat. Sering kali, masyarakat tidak sepenuhnya terlibat dalam proses perencanaan program, sehingga intervensi yang dijalankan mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan atau konteks lokal. Relasi kuasa menjadi penting untuk diteliti dalam fenomena pemulihan stunting karena kekuasaan mempengaruhi bagaimana kebijakan, program, dan intervensi diterapkan, serta bagaimana berbagai pihak terlibat dalam proses pemulihan. Dalam konteks stunting, kekuasaan tidak hanya berada di tangan pemerintah sebagai pengambil kebijakan, tetapi juga tersebar di antara berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, dan tokoh lokal.

Serta bagaimana berbagai pihak terlibat dalam proses pemulihan. Dalam konteks stunting, kekuasaan tidak hanya berada di tangan pemerintah sebagai pengambil kebijakan, tetapi juga tersebar di antara berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, dan tokoh lokal.

Pada penelitian ini, penulis kemudian mengajukan dua rumusan masalah yaitu: Pertama, bagaimana peran lembaga dari masing-masing stakeholder dalam praktik penanganan stunting di Puskesmas yang terdapat di Kota Makassar?. Pada rumusan masalah ini, penulis berusaha menganalisis peran setiap stakeholder yang berperan dalam praktik penanganan stunting di Kota Makassar dengan teori stakeholder yang dikembangkan oleh Freeman dapat diamati dari gagasan *Power & Interest Grid* oleh Eden & Ackermann. Identifikasi *stakeholder* merupakan sebuah langkah mencari dan menemukan untuk mengetahui *stakeholder*, dalam penelitian ini yakni *stakeholder* yang terlibat dalam program pemulihan stunting di Kota Makassar.

Dalam penelitian ini, untuk mengklasifikasi atau mengategorikan *stakeholder* berdasarkan tingkat kepentingan dan kekuatannya, yang mana juga menggunakan beberapa gabungan matriks yang telah disusun oleh Fran Ackerman dan Colin Eden. Kedua, bagaimana relasi kuasa sangat menentukan dalam praktik penanganan stunting di Puskesmas Kota Makassar? Pada rumusan masalah ini, penulis berusaha menganalisis relasi kuasa terkait faktor determinan dalam praktik penanganan stunting di Kota Makassar dengan teori relasi kuasa dari Foucault dan teori konstruktivisme dari Peter L. Berger.

Pada relasi kuasa yang dikemukakan oleh Foucault, Pemerintah dan akademisi memainkan peran dalam mendefinisikan stunting sebagai masalah kesehatan nasional yang memerlukan intervensi besar-besaran. Media juga membantu menyebarkan kesadaran tentang stunting. Sedangkan pada teori konstruktivisme dari Peter L. Berger, pemahaman masyarakat lokal tentang stunting dipengaruhi oleh informasi yang diberikan oleh petugas kesehatan, tokoh agama, dan media. Terdapat variasi dalam cara masyarakat menerima atau menolak intervensi berdasarkan bagaimana mereka memaknai stunting. Dalam kerangka ini, setiap elemen memiliki hubungan yang kompleks. Stakeholder seperti pemerintah, masyarakat, NGO, dan sektor swasta berperan dalam pemulihan stunting, namun peran ini tidak lepas dari relasi kuasa yang tersebar (Foucault).

Kekuasaan ini melibatkan siapa yang memiliki pengaruh untuk mendefinisikan masalah dan solusinya, serta bagaimana distribusi sumber daya terjadi. Lebih lanjut, konstruksi sosial tentang stunting dan interaksi antar stakeholders mempengaruhi bagaimana program dijalankan di lapangan. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menganalisis bagaimana hubungan kekuasaan dan konstruksi sosial berperan dalam praktik penanganan stunting di Indonesia, serta bagaimana keberhasilan atau hambatan dalam pelaksanaan program dipengaruhi oleh faktor-faktor ini.

BAB II PEMETAAN STAKEHOLDER YANG BERPERAN DALAM PRAKTIK PENANGANAN STUNTING DI KOTA MAKASSAR

2.1 Pendahuluan

Stunting, atau kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, merupakan salah satu masalah kesehatan yang mendesak di Indonesia, termasuk di Kota Makassar. Menurut data Kementerian Kesehatan, stunting berdampak pada kemampuan kognitif dan fisik anak, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM) jangka panjang. Dalam upaya mengatasi stunting, intervensi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan atau *stakeholders*. Kota Makassar, sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan dan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Timur Indonesia, menghadapi tantangan unik terkait stunting. Tingginya urbanisasi, ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan, serta ketidakseimbangan sosial-ekonomi menjadi faktor yang memperparah masalah stunting. Di tengah kompleksitas ini, peran *stakeholders* dalam pemulihan stunting menjadi sangat penting.

Meskipun Makassar memiliki fasilitas kesehatan yang lebih baik dibandingkan daerah pedesaan, angka stunting di wilayah ini masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan stunting tidak hanya terkait dengan ketersediaan layanan kesehatan, tetapi juga melibatkan berbagai faktor seperti pengetahuan masyarakat tentang gizi, kebiasaan makan, tingkat pendidikan, kemiskinan, serta kondisi sanitasi yang buruk di kawasan permukiman padat penduduk. Sebagai pusat kota yang berkembang pesat, Kota Makassar mengalami tantangan besar dalam menjangkau masyarakat miskin yang tinggal di kawasan kumuh, di mana sanitasi buruk dan kurangnya akses terhadap air bersih memperburuk status kesehatan balita. Dalam konteks ini, banyak *stakeholder* yang terlibat, termasuk pemerintah, sektor swasta, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), serta masyarakat lokal, masing-masing dengan peran, tanggung jawab, dan kekuatan berbeda dalam mempengaruhi hasil program pemulihan stunting.

Berbagai pemangku kepentingan memainkan peran kunci dalam pemulihan stunting di Makassar, dengan tujuan utama untuk menurunkan prevalensi stunting melalui intervensi gizi, pendidikan kesehatan, dan peningkatan infrastruktur sanitasi. Namun, tingkat keterlibatan dan efektivitas para stakeholder ini bervariasi. Pentingnya melakukan analisis stakeholder terletak pada pemahaman terhadap kekuatan, kepentingan, dan pengaruh yang dimiliki oleh masing-masing pihak dalam menyelesaikan masalah stunting.

Penelitian tentang relasi dan peran *stakeholders* dalam pemulihan stunting di Makassar penting karena beberapa poin yaitu: Pertama, mengoptimalkan kolaborasi: Melalui pemahaman yang lebih baik tentang relasi kuasa dan kepentingan masing-masing stakeholder, pemerintah dan pihak-pihak terkait dapat mengembangkan strategi kolaborasi yang lebih efektif untuk meminimalkan fragmentasi upaya. Kedua, meningkatkan efektivitas program: Analisis stakeholder memungkinkan penyesuaian program yang lebih tepat sasaran, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik komunitas lokal, sehingga intervensi menjadi lebih efektif. Ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat: Dengan mengidentifikasi cara terbaik melibatkan masyarakat, terutama kelompok marginal, penelitian ini dapat membantu memperkuat partisipasi aktif dari mereka yang paling terdampak oleh stunting, sehingga mereka tidak hanya menjadi objek program tetapi juga subjek perubahan.

2.2 Tinjauan Pustaka

a. Analisis Stakeholder.

Analisis stakeholder adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengevaluasi peran, kepentingan, serta pengaruh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam suatu proyek, kebijakan, atau program. Pemangku kepentingan adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap hasil dari suatu inisiatif. Analisis ini membantu organisasi atau manajer proyek untuk mengelola hubungan dengan para stakeholder secara lebih efektif, mengidentifikasi potensi risiko atau dukungan, serta memastikan keberhasilan implementasi suatu inisiatif.

Teori ini muncul karena adanya perkembangan kesadaran dan pemahaman bahwa perusahaan memiliki stakeholder, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Teori stakeholder artinya sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. Semua stakeholder mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan mereka.

Deegan (Mulyono, 2019) menyebutkan teori stakeholder diklasifikasikan dalam dua perspektif utama yaitu perspektif normatif dan perspektif positif. Dalam perspektif normatif, semua pemangku kepentingan, terlepas dari kekuatan mereka yang mempengaruhi, harus diperlakukan sama dan perusahaan harus etis serta bertanggung jawab kepada semua pemangku kepentingan. Perspektif positif, manajer perusahaan dipengaruhi oleh kekuatan pemangku kepentingan dan menghasilkan manajemen yang memberikan lebih banyak informasi sesuai dengan pengaruh kekuatan pemangku kepentingan. Salah satu strategi perusahaan untuk menjaga hubungan dengan para stakeholder adalah dengan mengungkapkan sustainability report yang menginformasikan perihal kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Teori Stakeholder yang dikembangkan oleh R. Edward Freeman adalah salah satu kerangka kerja manajemen strategis yang menekankan pentingnya memperhatikan berbagai kelompok yang berkepentingan (stakeholders) dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Teori ini diperkenalkan oleh Freeman dalam bukunya yang berjudul *Strategic Management: A Stakeholder Approach* (1984), yang memperluas pandangan tentang siapa yang harus diperhatikan oleh perusahaan di luar para pemegang saham (shareholders). Freeman berpendapat bahwa kesuksesan perusahaan tidak hanya bergantung pada bagaimana ia memuaskan pemegang saham (investor), tetapi juga pada bagaimana ia mengelola hubungan dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam operasinya.

Teori ini merupakan langkah maju dari model tradisional yang berfokus hanya pada pemegang saham dan mencakup berbagai kelompok yang memiliki hubungan dengan perusahaan. Freeman (1984) dalam mengembangkan teori stakeholder, memperkenalkan konsep stakeholder dalam dua model: (1) model kebijakan dan perencanaan bisnis; dan (2) model tanggung jawab sosial perusahaan dari manajemen stakeholder (Manisa & Defung, 2017). Teori stakeholder adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggungjawab (Freeman, 1984 dalam Safitri, 2015). Perusahaan harus menjaga hubungan dengan stakeholdernya dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan stakeholder-nya, terutama stakeholder yang mempunyai power terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, misal tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain (Chariri dan Ghazali, 2007).

Bentuk pengembangan dari teori stakeholder yang dikembangkan oleh Freeman dapat diamati dari gagasan *Power & Interest Grid* oleh Eden & Ackermann (1998). *Power & Interest Grid* adalah sebuah alat atau kerangka kerja yang dikembangkan oleh Colin Eden dan Fran Ackermann untuk membantu dalam mengelola pemangku kepentingan (stakeholders) dalam suatu proyek atau organisasi. Kerangka ini digunakan untuk memetakan berbagai pemangku kepentingan berdasarkan kekuatan (*power*) dan kepentingan (*interest*) mereka terhadap proyek atau inisiatif yang sedang berjalan. Dengan memahami siapa yang memiliki kekuatan dan kepentingan yang lebih besar, organisasi dapat mengembangkan strategi untuk mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan secara lebih efektif.

Dalam kerangka ini, dua dimensi utama digunakan untuk mengkategorikan pemangku kepentingan:

- *Power* (Kekuatan): Sejauh mana pemangku kepentingan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan, sumber daya, atau hasil dari proyek atau inisiatif. Pemangku kepentingan yang memiliki kekuatan tinggi adalah mereka yang bisa membuat keputusan besar, mengontrol sumber daya penting, atau memiliki pengaruh signifikan terhadap jalannya proyek.
- *Interest* (Kepentingan): Seberapa besar minat pemangku kepentingan terhadap proyek atau inisiatif tersebut. Kepentingan ini bisa didasarkan pada seberapa besar dampak proyek terhadap mereka, baik secara positif maupun negatif, atau seberapa besar perhatian dan

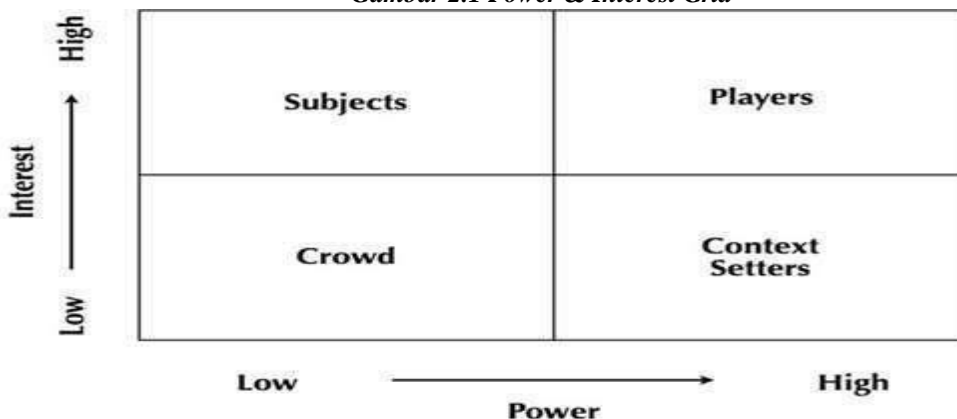
keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan dua dimensi tersebut, *Power & Interest Grid* mengelompokkan pemangku kepentingan ke dalam empat kategori:

- *High Power – High Interest* (Kekuatan Tinggi – Kepentingan Tinggi). Pemangku kepentingan dalam kategori ini memiliki kekuatan besar dan sangat peduli terhadap hasil proyek. Mereka adalah aktor kunci yang memiliki dampak langsung terhadap keberhasilan atau kegagalan proyek. Pemangku kepentingan ini harus dikelola secara dekat (*manage closely*). Ini berarti organisasi harus terlibat aktif dengan mereka, terus menginformasikan kemajuan, melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, serta memastikan kepentingan mereka diperhitungkan dalam setiap langkah.
- *High Power – Low Interest* (Kekuatan Tinggi – Kepentingan Rendah) Pemangku kepentingan ini memiliki kekuatan besar tetapi kepentingan mereka terhadap proyek relatif rendah. Meskipun mereka bisa mempengaruhi jalannya proyek, mereka mungkin tidak terlalu peduli dengan hasilnya. Pemangku kepentingan ini perlu dijaga kepuasannya (*keep satisfied*). Meskipun mereka tidak terlalu terlibat, penting untuk memastikan mereka tetap puas dan tidak berubah menjadi aktor yang mengganggu proyek. Ini bisa dilakukan dengan memberikan informasi berkala dan mengelola harapan mereka secara proaktif.
- *Low Power – High Interest* (Kekuatan Rendah – Kepentingan Tinggi). Pemangku kepentingan dalam kategori ini sangat peduli terhadap hasil proyek, tetapi mereka tidak memiliki banyak kekuatan untuk mempengaruhi keputusan atau hasil proyek. Pemangku kepentingan ini harus dijaga dalam lingkaran informasi (*keep informed*). Walaupun mereka tidak bisa mempengaruhi proyek secara langsung, penting untuk memastikan mereka selalu mendapatkan informasi yang relevan dan dipertimbangkan kepentingannya.
- *Low Power – Low Interest* (Kekuatan Rendah – Kepentingan Rendah). Pemangku kepentingan dalam kategori ini memiliki sedikit kekuatan dan kepentingan terhadap proyek. Mereka bukan pemain utama dan tidak terlibat secara aktif dalam proyek. Pemangku kepentingan ini bisa dipantau (*monitor*), tetapi tidak perlu ada tindakan signifikan untuk melibatkan mereka secara aktif. Mereka hanya perlu diperhatikan jika keadaan berubah dan kepentingan atau kekuatan mereka meningkat.

Identifikasi *stakeholder* merupakan sebuah langkah mencari dan menemukan untuk mengetahui *stakeholder*, dalam penelitian ini yakni *stakeholder* yang terlibat dalam program pemulihan stunting di Kota Makassar. Dalam penelitian ini, untuk mengklasifikasi atau mengategorikan *stakeholder* berdasarkan tingkat kepentingan dan kekuatannya, yang mana juga menggunakan beberapa gabungan matriks yang telah disusun oleh Fran Ackerman dan Colin Eden (1998). Klasifikasi dan mengategorikan *stakeholder* dilakukan pada matriks dua kali dua yang didalamnya terdapat kuadran atau kelompok yang dipetakan sesuai kepentingan (*interest*) pada suatu kegiatan dan kekuatan (*power*) yang dimiliki dalam mempengaruhi suatu kegiatan tersebut.

Gambar 2.1 Power & Interest Grid



Dalam matriks tersebut digambarkan dengan maksud tersendiri dari tiap posisi tergantung

tingkat kepentingan dan kekuatan atas peranan masing-masing *stakeholder*. Penjelasan rinci sebagai berikut:

- *Context setter*, adalah pihak *stakeholder* dengan kekuatan yang tinggi, namun memiliki tingkat kepentingan yang rendah. Sehingga *stakeholder* jenis ini tinggi resiko dan harus dipantau dalam proses pelaksanaan kebijakan.
- *Players* adalah pihak *stakeholder* dengan kekuatan yang tinggi, dan memiliki tingkat kepentingan yang tinggi. Jenis *stakeholder* ini bersifat aktif terlibat dalam berjalannya kebijakan.
- *Crowd*, adalah pihak *stakeholder* dengan kekuatan yang lemah serta tingkat kepentingan yang lemah. Keberadaan dari *stakeholder* jenis *crowd* sebenarnya mempengaruhi hasil yang diinginkan namun dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu.
- *Subject*, adalah pihak *stakeholder* dengan kekuatan yang lemah, namun memiliki tingkat kepentingan yang tinggi. *Stakeholder* ini memiliki keberadaan yang mendukung tetapi kapasitas terhadap dampak terhitung kurang signifikan.

2.3 Metode Penelitian

Dalam sebuah penulisan ilmiah, hendaknya penulisan tersebut menggunakan metodologi yang tersistematis dan memenuhi standar penelitian yang ilmiah. Maka, selanjutnya penulis akan menjelaskan mengenai metode ilmiah yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian kualitatif. menurut Sugiyono (2020) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Berangkat dari pengertian tersebut, penulis kemudian mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia dengan menggali makna, pengalaman, atau perspektif individu atau kelompok. Metode penelitian kualitatif dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini dikarenakan peneliti berusaha untuk menjelajahi dan mendeskripsikan relasi kuasa pada praktik penanganan stunting di Puskesmas Kota Makassar.

a. Pendekatan Penelitian

Prasetyo dan Jannah (2011) menyebutkan pendekatan adalah metode ilmiah yang memberikan tekanan utama pada penjelasan konsep dasar yang kemudian dipergunakan sebagai sarana analisis. Pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan sebuah uraian serta penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek yang dimiliki seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi, atau suatu program, maupun suatu situasi sosial. Studi kasus digunakan untuk memberikan suatu pemahaman terhadap suatu yang menarik perhatian, suatu peristiwa konkret, proses sosial. Lebih jelasnya Yin (2012) mengatakan bahwa studi kasus sebagai proses penelitian akan fenomena yang terjadi dengan fokus pada pengalaman hidup seseorang, jika terdapat gap antara sebuah fenomena dengan konteks yang ada.

Alasan pemilihan pendekatan studi kasus karena membuat peneliti dapat memahami berbagai fakta kasus tersebut, bagaimana kaitan kasus tersebut dengan konteks dan bidang keilmuan, apa teori yang terkait dengan kasus tersebut, apa pelajaran yang dapat diambil untuk memperbaiki kehidupan manusia. Dan studi kasus yang digunakan ialah studi kasus intrinsik. Studi kasus intrinsik adalah kasus yang dipelajari secara mendalam mengandung hal-hal yang menarik untuk dipelajari berasal dari kasus itu sendiri.

b. Lokasi dan Waktu Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penulisan adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penulisan berlangsung. Penentuan lokasi penulisan sangat penting karena berhubungan dengan data-data yang harus dicari sesuai dengan fokus yang ditentukan, lokasi penulisan juga menentukan apakah data memenuhi syarat baik volume maupun karakter data yang dibutuhkan dalam penulisan. Penulisan ini dilakukan di Kota Makassar.

Kota Makassar merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Selatan dan mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam provinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan barat ke wilayah kawasan timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia.

Penulis memilih Kota Makassar dikarenakan beberapa indikator yaitu:

- Tingkat Pendidikan.

Tingkat pendidikan merujuk pada level atau jenjang formal yang telah dicapai seseorang dalam proses pendidikan. Pada Tahun 2023, Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Makassar adalah 15,61 Tahun. Artinya, anak berusia di atas 7 Tahun di Kota Makassar diharapkan dapat bersekolah selama 15,61 Tahun. Sementara Rata-Rata Lama Sekolah pada Tahun 2023 adalah 11,56 Tahun. Dengan kata lain, rata-rata pemuda di Kota Makassar dapat menyelesaikan pendidikan hingga 11,56 Tahun. Kemajuan yang dicapai di bidang pendidikan sangat terkait dengan ketersediaan fasilitas pendidikan.

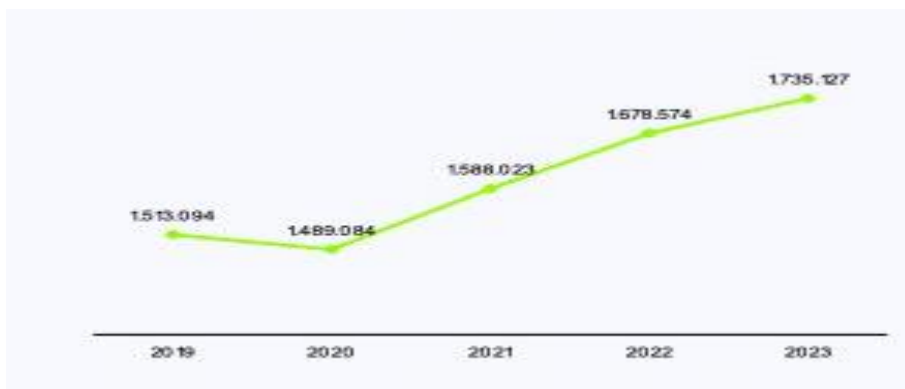
Gambar 2.2 Indikator Pendidikan Kota Makassar

Indikator	2021	2022	2023
Harapan Lama Sekolah	15,58	15,59	15,61
Rata-Rata Lama Sekolah	11,43	11,55	11,56
Angka Partisipasi Sekolah			
7-12 Tahun	99,82	99,62	99,34
13-15 Tahun	93,57	93,34	93,88
16-18 Tahun	73,38	73,03	71,19

- Tingkat Kesejahteraan Penduduk

Dalam melihat tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah, salah satu indikator yang dapat digunakan adalah pengeluaran perkapita penduduk. Pengeluaran di sini adalah salah satu metode pendekatan dalam mengukur pendapatan penduduk. Secara umum, selama Tahun 2019 hingga Tahun 2023 tingkat kesejahteraan penduduk Kota Makassar mengalami peningkatan. Pada Tahun 2019 hingga Tahun 2020 terjadi penurunan pengeluaran perkapita dikarenakan pandemi covid-19. Kemudian mengalami peningkatan kembali pada Tahun 2021 hingga Tahun 2023. Pengeluaran nominal perkapita penduduk menurun dari Rp 1.513.094 pada Tahun 2019 menjadi Rp. 1.489.084 pada 2020 akibat pandemi Covid-19. Selanjutnya, pengeluaran kembali meningkat pada 2021 hingga Tahun 2023 menjadi Rp. 1.735.127. Hal tersebut merupakan indikasi membaiknya kondisi perekonomian di Kota Makassar pasca pandemi Covid-19.

Gambar 2.3 Perkembangan Pengeluaran Perkapita Kota Makassar Tahun 2019-2023



- Data Fasilitas Kesehatan.

Fasilitas kesehatan merujuk pada berbagai jenis tempat yang menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat. Fasilitas ini berperan penting dalam upaya menjaga dan meningkatkan kesehatan individu serta masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 2.1 Fasilitas Kesehatan Tahun 2023

Kecamatan	Rumah Sakit Umum	Rumah Sakit Khusus	Puskesmas Rawat Inap	Puskesmas Non Rawat Inap	Klinik Pratama	Posyandu
Mariso	1		1	2		52
Mamajang	2	3	1	1		60
Tamalate	3		1	3		90
Rappocini	4	4	2	2		122
Makassar	1	2	1	2		92
Ujung Pandang	3	6		1		32
Wajo	2	1		2		35
Bontoala		1		2		55
Ujung Tanah	1	1	1	1		37

Kepulauan Sangkarrang			1	1		13
Tallo			1	2		85

Panakkukang	3	2	1	4		81
Manggala	1		1	3		83
Biring Kanaya	3	2		5		108
Tamalanrea	3	2	1	4		68
Makassar	27	24	12	35		1013

Sumber: Makassar Dalam Angka tahun 2024

- Data Stunting.

Stunting adalah kondisi pertumbuhan terhambat pada anak-anak akibat malnutrisi, yang sering kali disebabkan oleh kekurangan gizi dalam jangka waktu lama, infeksi berulang, dan kondisi lingkungan yang buruk. Data mengenai stunting sangat penting untuk penanganan dan pencegahan masalah ini, serta untuk perencanaan dan evaluasi program-program kesehatan.

Tabel 2.2 Stunting di Kota Makassar Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Balita	Stunting		Persentase Kasus Stunting
		Pendek	Sangat Pendek	
2022	87.251	2,849	693	4,06
2023	89.443	2,003	805	3,14
2024	91.053	2,199	797	3.29

Sumber: Dinkes Kota Makassar Juni 2024

Tabel 2.3 Angka Stunting Kota Makassar

Tahun	Jumlah Balita	Persentase Kasus Stunting
2021	116.269	18,8 %
2022	87.251	18,04 %
2023	89.443	25,6 %

Sumber: Dinkes Kota Makassar 2023 (SKI)

- Trend Stunting di Kota Makassar

Trend stunting di Kota Makassar dari 2021 hingga Februari 2023 dapat memberikan wawasan penting mengenai masalah gizi anak pada skala nasional hingga skala Kota Makassar. Dari data yang penulis terima tren stunting Kota Makassar melalui Survei Kesehatan Indonesia (SKI) menunjukkan data

yang sangat fluktuasi dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang sangat tajam dari 18,8 % ke 25,6%.

Tabel 2.4 Trend Stunting di Kota Makassar 2021- 2023 (Survei SKI Indonesia)

SKALA	2021	2022	2023
Nasional	24,4	21,6	21,6
Provinsi Sulawesi Selatan	27,4	27,2	27,4
Kota Makassar	18,8	18,4	25,6

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar 2024

Sedangkan *data by name by adres* kecamatan menunjukkan tren penurunan jumlah stunting dari tahun ke tahun, meskipun ada beberapa kecamatan yang terlihat mencatatkan lonjakan dalam satu tahun tertentu. Misalnya, Kecamatan Wajo menunjukkan persentase stunting yang signifikan dan lonjakan tren pada 2023, tetapi berhasil menurunkan kasusnya pada Februari 2024.

Meskipun total stunting mengalami penurunan, persentase di beberapa kecamatan tetap tinggi. Misalnya, Kecamatan Tamalate dan Ujung Pandang memiliki kasus yang masih signifikan, sehingga perbaikan kesehatan dan gizi anak perlu terus diupayakan di daerah tersebut. Kecamatan Mariso meskipun memiliki jumlah kasus stunting yang lebih sedikit, menunjukkan penurunan persentase yang baik dari 1,70% di 2021 menjadi 2,68% di Februari 2024, mengindikasikan perbaikan dalam penanganan stunting.

Gambar 2.4 Trend Stunting di Kota Makassar 2021-Februari 2024 (E-PPGBM)

NO	KECAMATAN	2021		2022			2023			Feb-24		
		Stunting	%	Stunting	%	TREND	Stunting	%	TREND	Stunting	%	TREND
1	MARISO	44	1,70	77	2,15	↑0.45	90	2,86	↑0.71	84	2,68	↓0.18
2	MAMAJANG	96	3,56	87	3,26	↓0.3	110	3,42	↑0.16	46	1,55	↓1.87
3	TAMALATE	242	3,09	681	6,52	↑3.43	487	4,04	↓2.48	425	3,60	↓0.44
4	RAPPOCINI	333	6,96	354	7,34	↑0.38	251	3,81	↓3.53	267	3,85	↑0.04
5	MAKASSAR	177	6,27	47	0,94	↓5.33	72	1,53	↑0.58	96	2,27	↑0.74
6	UJUNG PANDANG	33	2,43	40	2,80	↑0.37	6	0,56	↓2.24	0	0,00	↓0.56
7	WAJO	16	1,70	54	5,33	↑3.63	32	2,60	↓2.73	30	2,62	↑0.02
8	BONTOALA	288	8,42	217	6,52	↓1.9	185	5,98	↓0.54	156	5,46	↓0.52
9	UJUNG TANAH	48	2,21	81	3,57	↑1.36	52	2,59	↓0.98	50	2,54	↓0.05
10	SANGKARRANG	117	11,78	90	8,09	↓3.69	67	5,85	↓2.24	67	6,80	↑0.95
11	TALLO	534	6,26	366	4,51	↓1.75	354	4,05	↓0.46	316	3,63	↓0.42
12	PANAKKUKANG	234	2,25	344	3,09	↑0.84	287	2,36	↓0.73	306	2,57	↑0.21
13	MANGGALA	175	2,69	195	3,10	↑0.41	228	2,97	↓0.13	272	3,27	↑0.30
14	BIRINGKANAYA	752	6,43	605	4,63	↓2.07	423	3,27	↓1.36	407	3,18	↓0.09
15	TAMALANREA	823	10,63	95	1,30	↓9.33	90	1,22	↓0.08	72	0,98	↓0.24
	KOTA MAKASSAR	3912	5,25	3333	4,06	↓1.17	2734	3,14	↓0.92	2594	3,01	↓0.13

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2024

2) Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan rentang masa yang dibutuhkan oleh peneliti untuk melakukan sebuah observasi dan penggalan data selama di lapangan. Lamanya waktu penelitian ditentukan sendiri oleh seorang peneliti sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan yang dimaksud oleh peneliti adalah

kegiatan dari persiapan penelitian, observasi penelitian, seminar proposal, pengumpulan data penelitian, pengolahan data penelitian, penyusunan hasil penelitian, seminar hasil, dan seminar tutup. Proses penelitian ini akan dilaksanakan selama 11 (sebelas) bulan dimulai dari bulan September 2024 hingga Agustus 2025. Agar waktu dalam penelitian mudah dipahami dengan jelas, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2024				2025							
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
1	persiapan penelitian												
2	observasi penelitian												
3	seminar proposal												
4	pengumpulan data penelitian												
5	Pengolahan data penelitian												
6	Penyusunan hasil penelitian												
7	seminar hasil												
8	seminar tutup												

c. Sumber Data

Sumber data adalah suatu subyek dari mana data diperoleh. Sumber data diperlukan untuk menunjang terlaksananya penelitian dan sekaligus untuk menjamin keberhasilan. Dalam hal ini data yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh dari dua sumber, yaitu:

- Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti sebagai pengumpul data. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Data sekunder dikumpulkan dari monograf penelitian, publikasi ilmiah dan media massa, prosiding, laporan pemerintah Kota Makassar, dan monograf yang diterbitkan sebelumnya untuk menganalisis kegiatan dan fenomena stunting.

- Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sekunder. Sumber data sekunder tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumen atau melalui orang lain. Data sekunder dikumpulkan dari monograf penelitian, publikasi

ilmiah dan media massa, prosiding, laporan pemerintah Kota Makassar, dan monograf yang diterbitkan sebelumnya yang menganalisis kegiatan atau program dan dampaknya terhadap masyarakat kota Makassar.

d. Teknik Penentuan Informan

Informan penelitian adalah orang-orang yang memberikan berbagai informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam (Afrizal, 2015). Informan penelitian ini meliputi orang-orang yang mengetahui dan berhubungan dengan permasalahan penelitian serta berada pada lokasi penelitian. Informan penelitian digunakan untuk penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Dalam menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah mekanisme penentuan informan secara sengaja. Sengaja yang dimaksud adalah sebelum melakukan penelitian, peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang dijadikan sumber informasi. Informan yang digunakan dalam penelitian ini memiliki karakteristik sebagai berikut

Tabel 2.6 Teknik Penentuan Informan

Lembaga/Non Lembaga	Karakteristik	Informan
Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pejabat atau staf yang terlibat langsung dalam program kesehatan dan nutrisi. • Pengalaman kerja dalam bidang kesehatan masyarakat dan penanganan gizi, terutama terkait dengan isu stunting. • Memiliki pemahaman yang baik tentang data stunting, intervensi yang diterapkan, dan kebijakan kesehatan terkait. • Mampu menjelaskan interaksi mereka dengan lembaga lain dan komunitas dalam penanganan stunting. 	Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Staf yang mengelola program program sosial dan kesejahteraan masyarakat. • Pengalaman dalam menangani isu kemiskinan dan aksesibilitas layanan bagi masyarakat, khususnya untuk keluarga yang terdampak stunting. • Memahami program bantuan sosial yang berpotensi mengurangi stunting dan kriteria penerima manfaat. • Bisa menjelaskan keterlibatan masyarakat dalam program serta tantangan yang dihadapi. 	Kasubag Umum/Humas
Dinas P2KB	<ul style="list-style-type: none"> • Kadis DP2KB • Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan P2KB 	Kasubag Perencanaan DP2KB

	<ul style="list-style-type: none"> • Kasubag Perencanaan Dinas P2KB • Memahami program dan penganggaran di DP2KB 	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Staf yang terlibat dalam perencanaan program pembangunan daerah dan anggaran. • Pengalaman dalam merancang dan mengimplementasikan program-program pembangunan yang terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan. • Memahami indikator stunting dalam rencana pembangunan daerah dan penganggaran sumber daya. • Mampu menjelaskan kerjasama lintas sektor dalam pembiayaan dan implementasi program pengurangan stunting. 	Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum Bappeda Kota Makassar
Puskesmas	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter, perawat, atau tenaga gizi yang bekerja di Puskesmas. • Pengalaman dalam menangani kasus stunting dan melaksanakan program kesehatan masyarakat. • Memahami faktor penyebab stunting dan langkah-langkah pencegahan serta penanganan yang telah dilakukan di lapangan. • Interaksi dengan keluarga yang mengalami stunting dan pengalaman dalam memberikan edukasi kepada mereka. 	Kasubid Penyuluhan Kesehatan
DPRD Kota Makassar	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota DPRD, dengan perhatian atau komisi tertentu yang berfokus pada kesehatan, pendidikan, atau pemberdayaan masyarakat. • Pengalaman sebagai anggota DPRD, baik yang baru terpilih maupun yang sudah lama menjabat, dengan pengetahuan mengenai dinamika politik lokal. • Memiliki keterlibatan langsung dalam merumuskan, mendukung, atau mengawasi kebijakan terkait dengan upaya penanganan stunting. 	Komisi D DPRD Kota Makassar

Warga	<ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang ekonomi dibawah garis kemiskinan. • Mampu mendeskripsikan pengalaman mereka dan anggota keluarga yang mengalami stunting, serta dampak sosial dan emosional yang ditimbulkan. • Informasi mengenai akses mereka terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan dukungan sosial. 	Warga
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

Penggunaan teknik ini akan berhenti apabila data yang diperoleh telah jenuh dan tidak berkembang lagi dan sama dengan data yang diperoleh sebelumnya. Setelah mendapatkan informan yang sesuai dengan kriteria tersebut, penulis kemudian memetakan informan dalam 4 kluster informan berdasarkan pemetaan stakeholder yaitu subjek, pemain kunci, pengikut lain, pendukung.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang kemudian disesuaikan dengan sumber datanya maka akan terbagi menjadi dua yaitu:

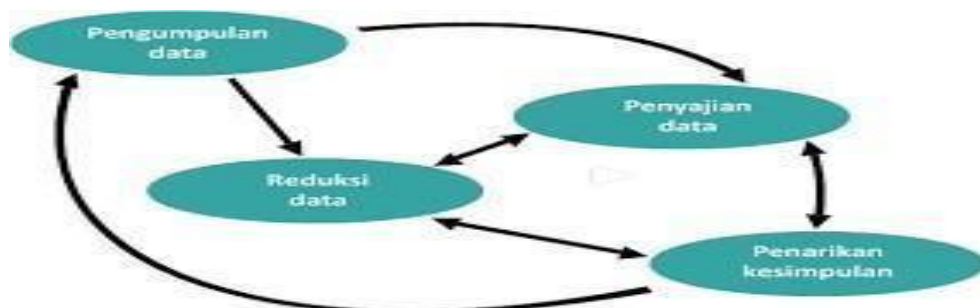
- Sumber Data Primer. Untuk sumber data primer akan menggunakan teknik wawancara, yaitu: Salah satu teknik pengumpulan data yang lazim dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah suatu wawancara tanpa alternatif pilihan jawaban dan dilakukan untuk mendalami informasi dari seorang informan (Afrizal, 2015). Wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara semiterstruktur (*semistructure interview*).
- Sumber Data Sekunder. Studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi melalui literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel dan makalah yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti serta analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara yang digunakan untuk mengkategorikan data untuk mendapatkan pola hubungan, tema dan menafsirkan apa yang bermakna dan dimuat dalam laporan penelitian. Menurut Afrizal (2015) ada dua tahap analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu: pertama, pada tahap pengumpulan data dan oleh sebab itu analisis data dilakukan di lapangan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman. Secara garis besar, Miles dan Huberman membagi analisis data dalam penelitian kualitatif ke dalam tiga tahap, yaitu reduksi atau kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Afrizal, 2015).

Gambar 2.5 Alur Analisis Data Miles & Huberman



Adapun alur analisis data yang digunakan, adalah sebagai berikut:

- Pengumpulan data. Proses pengumpulan data merupakan langkah krusial dalam penelitian ilmiah. Kualitas data yang dikumpulkan akan menentukan keakuratan dan keandalan hasil penelitian.
- Reduksi data. Pada tahap ini dilakukan proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan serta pengabstraksian data dari cacatan lapangan.
- Penyajian data. Sajian data adalah suatu susunan informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan.
- Penarikan kesimpulan. Dari awal pengumpulan data, peneliti sudah harus memahami apa arti dari berbagai hal yang ia temui dengan mulai melakukan pencatatan pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi, alur sebab akibat dan berbagai proposisi. Hal itu akan diverifikasi dengan temuan-temuan data selanjutnya dan akhirnya sampai pada penarikan kesimpulan akhir.

g. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan derajat kepercayaan atau kebenaran hasil suatu penelitian. Menurut Lincoln dan Guba dalam Wijaya (2013), keabsahan data di dalam penelitian kualitatif, suatu realistis itu bersifat majemuk dan dinamis, sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. Keabsahan data dapat dicapai dengan menggunakan proses pengumpulan data dengan teknik triangulasi data. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Menurut Wijaya terdapat tiga macam model triangulasi yaitu: triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu. Sedangkan menurut Denzin ada empat macam triangulasi data dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori ada beberapa macam yaitu: triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi penyelidikan, dan triangulasi teori.

Dalam penelitian ini triangulasi data akan dilakukan dengan cara menggabungkan model triangulasi data ala Wijaya dengan triangulasi data ala Denzin menjadi seperti berikut:

- Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara (triangulasi sumber).
- Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan dengan apa yang dikatakan pribadi (triangulasi sumber).
- Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu (triangulasi metode).
- Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang memiliki latar belakang yang berlainan (triangulasi penyidik).
- Membandingkan hasil wawancara dengan suatu hasil dokumen yang berlainan dengan menggunakan tahapan ini diharapkan dapat menjamin validitas data (triangulasi teori).

h. Keterbatasan

Studi ini dibatasi oleh kondisi tertentu yang berada di luar kendali peneliti. Pertama, ada kekhawatiran terkait analisis unit. Peneliti akan mengumpulkan data terutama dari informan sebagai representasi dari kelompok, komunitas, atau lembaganya. Kedua, karena wilayah kota Makassar cukup luas dan meliputi 15 kecamatan maka pengambilan data dan informasi pada wilayah yang telah ditentukan saja memungkinkan terjadinya salah tafsir data atau tidak mengcover keseluruhan data yang telah diperoleh.

i. Defenisi Operasional dan Variabel Penelitian

Sugiyono (2012) menyebutkan definisi operasional merupakan penentuan kontrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Sedangkan variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sanusi, 2017).

Tabel 2.7 Operasionalisasi Konsep

Konsep	Defenisi Konsep	Variabel
<i>Players</i>	pemangku kepentingan sangat penting untuk merumuskan strategi yang efektif dalam pengelolaan proyek atau kebijakan.	<ul style="list-style-type: none"> ● Peran ● Program
<i>Context Setter</i>	pemangku kepentingan yang memiliki kekuasaan tinggi tetapi ketertarikan yang relatif rendah terhadap isu atau proyek yang sedang berlangsung.	<ul style="list-style-type: none"> ● Peran ● Program
<i>Subject</i>	pemangku kepentingan yang memiliki ketertarikan tinggi dan dapat termasuk individu, kelompok, atau organisasi yang langsung terpengaruh oleh keputusan atau tindakan proyek.	<ul style="list-style-type: none"> ● Peran ● Program
<i>Crowd</i>	pemangku kepentingan yang memiliki kekuasaan dan ketertarikan rendah terhadap isu atau proyek.	<ul style="list-style-type: none"> ● Peran ● Program

2.4 Hasil Penelitian

A. Profil Informan

Penelitian ini dilakukan dalam rangka menganalisis penanganan stunting di Kota Makassar. Dalam Bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian penulis sebagai sebuah jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti juga akan membahas mengenai karakteristik informan yang merupakan seluruh stakeholder yang memiliki peran dalam penanganan stunting di Kota Makassar. Di bab ini juga akan dibahas dan disajikan data-data hasil penelitian dalam bentuk deskriptif mengenai relasi kuasa dalam praktik penanganan stunting di Kota Makassar. Selain itu, peneliti juga akan membahas mengenai profil informan yang dipilih secara *purposive sampling*.

- Informan A

Sunarti yang kemudian penulis samarkan menjadi informan A adalah Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kota Makassar Kota Makassar. Informan memiliki tingkat pendidikan S2 Manajemen. Informan telah menjadi Kabid Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kota Makassar Kota Makassar selama 2 (dua) tahun dan bertanggung jawab atas perencanaan, implementasi, dan evaluasi program-program kesehatan masyarakat di Kota Makassar.

- Informan B

Nur Qalby yang kemudian penulis samarkan menjadi informan B adalah Kasubag Kepegawaian di Dinas Sosial Kota Makassar Kota Makassar. Informan B memiliki tingkat pendidikan S1 Ilmu Administrasi Negara. Informan telah menjadi Kasubag Umum/Humas Dinas Sosial Kota Makassar Kota Makassar selama 3 (tiga) tahun dengan tanggung jawab yang mencakup pengelolaan komunikasi, publikasi, dan hubungan masyarakat. Adapun detail pekerjaan informan B adalah mempromosikan kegiatan dan program Dinas Sosial Kota Makassar melalui berbagai platform media, serta menyelenggarakan acara sosial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

- Informan C

Noptiadi yang kemudian penulis samarkan menjadi informan C adalah Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum Bappeda Kota Makassar Kota Makassar. Informan C memiliki tingkat pendidikan magister manajemen. Informan telah menjadi Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan

Umum selama 3 (tiga) tahun dengan detail pekerjaan berupa menyusun dan mengimplementasikan kebijakan terkait pendanaan program sosial dan budaya, serta berkontribusi dalam perencanaan pembangunan daerah yang inklusif.

- Informan D

Satriani Martha yang kemudian penulis samarkan menjadi informan D adalah Ahli Gizi Kesehatan di Puskesmas Sudiang Raya. Informan D memiliki tingkat pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat. Informan telah menjadi Kasubid Penyuluhan Kesehatan Puskesmas Sudiang selama 4 (empat) tahun. Informan D bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penyuluhan kesehatan untuk masyarakat. Selain itu mengembangkan materi edukasi kesehatan dan melakukan pelatihan untuk petugas kesehatan dan relawan.

- Informan E

Eshin Usami Nur Utami yang kemudian penulis samarkan menjadi informan E adalah anggota Komisi D DPRD Kota Makassar Kota Makassar. Informan E memiliki tingkat pendidikan S1 Kedokteran Gigi dan telah menyelesaikan pendidikan keprofesian dokter giginya. Informan telah menjadi anggota Komisi D DPRD Kota Makassar Kota Makassar selama 1 (satu) tahun. Informan E terlibat dalam pembahasan dan pengawasan kebijakan daerah di sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Memiliki pengalaman praktik sebagai dokter gigi sebelum bergabung dengan DPRD Kota Makassar. Berfokus pada perawatan kesehatan gigi dan edukasi kesehatan kepada pasien. Aktif dalam partai politik Golkar sebelum terpilih sebagai anggota DPRD Kota Makassar. Terlibat dalam berbagai kegiatan politik, kampanye, dan advokasi isu-isu kesehatan dan pendidikan.

- Informan F

Kurniati Tahir, S.STP, MSI yang kemudian penulis samarkan menjadi informan F adalah Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar. Informan F memiliki tingkat pendidikan S2 Ilmu Administrasi Publik. Informan telah menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Keluarga selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Informan F bertanggung jawab atas program pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan, pengetahuan, dan keterampilan dalam aspek kehidupan keluarga., Serta mengembangkan program pelatihan untuk anggota keluarga dan masyarakat.

- Informan G (Warga di Kelurahan Sudiang)

Celine yang kemudian penulis samarkan menjadi informan G adalah seorang ibu dari anak yang didiagnosa menderita stunting. Informan G memiliki tingkat pendidikan SLTA. Informan G menikah dengan suami yang bekerja sebagai driver ojek online (ojol) motor dengan pendapatan harian Rp. 100.000. Selain itu, memiliki 3 orang anak. Anak ketiga telah didiagnosa menderita stunting, yang membuat keluarga ini menghadapi tantangan dalam hal kesehatan dan gizi. Keluarga ini dapat dikategorikan sebagai keluarga miskin, dengan penghasilan yang rendah dan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.

- Informan I

Fachridaya yang kemudian penulis samarkan menjadi informan I adalah kader posyandu di Puskesmas Sudiang Raya. Informan H memiliki tingkat pendidikan SLTA. Informan telah menjadi kader posyandu selama 1 (satu) tahun. Informan sebagai kader Posyandu memberikan penyuluhan kepada orang tua mengenai pentingnya gizi seimbang, pola makan yang sehat, dan cara memberikan makanan bergizi kepada anak. Selain itu informan sebagai kader posyandu bertanggung jawab dalam peningkatan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi stunting dan pentingnya pemenuhan gizi pada masa kehamilan dan awal kehidupan anak.

Tabel 2.8 Profil Informan

No	Nama	Jabatan
1	Sunarti	Kabid. Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Makassar

2	Nur Qalby	Kasubag Dinas Sosial Kota Makassar
3.	Noptiadi	Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum Bappeda Kota Makassar
4	Satriani Martha	Ahli Gizi Kesehatan di Puskesmas Sudiang Raya
5	Eshin Usami Nur Rahman	Anggota DPRD Kota Makassar Komisi D
5	Kurniati tahir, S.STP, MSI	Kabid Penyuluhan dan Penggerakan, Dinas PPKB
7	Celine	Ibu dengan Anak Stunting
8	Fahridayani	Kader Posyandu

B. Pemetaan Stakeholder Yang Berperan Dalam Praktik penanganan stunting Di Kota Makassar

Stunting, atau gagal tumbuh, merupakan kondisi di mana anak mengalami pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif yang terhambat akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Stunting memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap kesehatan, pendidikan, dan produktivitas anak di masa depan. Oleh karena itu, intervensi untuk memulihkan anak-anak yang mengalami stunting memerlukan kolaborasi dari berbagai stakeholder. Dalam penelitian ini, peneliti berdasarkan observasi dan wawancara mengidentifikasi dan menganalisis peran masing-masing stakeholder yang terlibat dalam praktik pemulihan stunting.

Keberlanjutan program penanganan stunting menjadi fokus utama dalam pembangunan SDM Kota Makassar. Komitmen stakeholder terhadap keberlanjutan ini dituangkan dalam serangkaian kesepakatan dan rencana aksi yang menggarisbawahi peran masing-masing pihak dalam penanganan stunting. Untuk mengatasi masalah stunting, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemetaan stakeholder menjadi langkah awal yang sangat penting untuk memahami ekosistem yang ada dalam penanganan stunting.

Pemetaan stakeholder memungkinkan untuk mengidentifikasi berbagai aktor yang terlibat dalam penanganan stunting, baik dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Setiap stakeholder memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Dengan pemetaan yang jelas, dapat dipastikan bahwa semua pihak bisa berkontribusi sesuai dengan keahlian dan kapasitas yang dimiliki. Pemetaan stakeholder memfasilitasi komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antar lembaga. Dengan adanya pemetaan, masing-masing pihak dapat memahami posisi dan peran mereka dalam ekosistem, sehingga menghindari tumpang tindih atau kekurangan dalam program penanganan stunting.

Memahami konstelasi stakeholder membantu dalam merumuskan strategi penanganan stunting yang lebih efektif. Ini juga memudahkan dalam menentukan strategi komunikasi yang tepat untuk masing-masing stakeholder. Pemetaan stakeholder memungkinkan untuk menentukan indikator keberhasilan yang relevan untuk setiap kelompok pemangku kepentingan. Hal ini memudahkan dalam mengukur dampak program, mendapatkan umpan balik, dan melakukan penyesuaian strategi sesuai dengan kebutuhan.

Pemetaan yang baik tidak hanya mencakup aktor formal, tetapi juga komunitas lokal dan individu. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pemetaan, mereka bisa lebih memahami peran mereka dalam penanganan stunting dan lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam program tersebut. Pemetaan stakeholder dalam penanganan stunting bukan hanya langkah awal yang penting, tetapi merupakan bagian integral dari keseluruhan proses intervensi. Dengan pemetaan yang baik, semua aktor dapat berkontribusi secara maksimal, koordinasi lintas sektor dapat ditingkatkan, dan strategi penanganan stunting dapat dirancang serta dilaksanakan secara efektif. Dalam konteks yang semakin kompleks dan saling terkait, pemetaan stakeholder akan menjadi kunci untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam mengurangi angka stunting dan meningkatkan kesehatan anak di Kota Makassar.

Mengidentifikasi pemangku kepentingan dalam suatu proyek atau kebijakan adalah langkah penting yang memerlukan pendekatan komprehensif dan inklusif. Proses ini dimulai dengan memahami konteks proyek, termasuk tujuan dan dampak potensialnya, untuk menentukan siapa yang mungkin terpengaruh. Pendekatan partisipatif seperti wawancara dan diskusi kelompok terfokus melibatkan masyarakat setempat untuk mengidentifikasi individu atau kelompok yang relevan. Selain itu, sumber data sekunder seperti laporan pemerintah dan penelitian akademis dapat memberikan wawasan tambahan.

Identifikasi berbasis peran dan tanggung jawab membantu menentukan siapa saja yang memiliki pengaruh dalam struktur sosial lokal. Teknologi informasi seperti media sosial dan analisis jaringan sosial dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan yang mungkin terlewatkan dengan metode tradisional. Pendekatan yang inklusif ini memastikan semua pihak yang relevan teridentifikasi dan dilibatkan, meminimalkan risiko konflik, dan memastikan dukungan serta partisipasi efektif dari semua pemangku kepentingan yang terlibat.

Pendekatan pentahelix dalam analisis pemangku kepentingan menekankan kolaborasi antara lima pilar utama: pemerintah, masyarakat, akademisi, bisnis, dan media. Proses analisis dimulai dengan mengidentifikasi semua pemangku kepentingan yang relevan dan mengelompokkan mereka ke dalam lima elemen tersebut. Selanjutnya, dilakukan evaluasi terhadap pengaruh dan kepentingan masing-masing pemangku kepentingan, yang kemudian dipetakan dalam matriks pengaruh-minat. Matriks ini membagi pemangku kepentingan ke dalam empat kategori: tinggi-tinggi, tinggi-rendah, rendah-tinggi, dan rendah-rendah. Berdasarkan kategorisasi ini, strategi keterlibatan khusus dikembangkan untuk memastikan setiap kelompok terlibat dengan cara yang sesuai dengan peran dan kapasitas mereka. Penting untuk mendorong kolaborasi lintas sektor antara semua elemen pentahelix guna menciptakan sinergi yang optimal dalam implementasi proyek, seperti melibatkan akademisi dalam penelitian dampak, memanfaatkan bisnis untuk sumber daya dan teknologi, serta menggunakan media untuk komunikasi dan penyebaran informasi. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan dilakukan untuk menilai efektivitas keterlibatan pemangku kepentingan dan menyesuaikan strategi berdasarkan umpan balik serta perkembangan proyek. Dengan memanfaatkan kekuatan kolaboratif dari seluruh elemen masyarakat, pendekatan pentahelix memungkinkan integrasi perspektif yang lebih luas dan mendukung inovasi dalam pelaksanaan proyek, sehingga dapat mencapai hasil yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan adanya dokumen dukungan dan komitmen ini, program pengentasan stunting di Kota Makassar tidak hanya dipandang sebagai kewajiban karena program pimpinan daerah tetapi sebagai langkah awal menuju pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkelanjutan. Dukungan kolektif ini memastikan bahwa Kota Makassar kedepannya menjadi Kota Dunia yang bukan hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur tetapi juga pembangunan Sumber Daya Manusia.

Pada konteks penanganan dan pengentasan stunting di Kota Makassar, pendekatan pentahelix pemangku kepentingan menawarkan pendekatan yang menyeluruh dan integratif. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara lima pilar utama: pemerintah, masyarakat, akademisi, bisnis, dan media, untuk mencapai tujuan yang berkelanjutan dan inklusif. Pada program penanganan stunting, pendekatan pentahelix ini menjadi sangat relevan mengingat keberagaman pemangku kepentingan yang

terlibat. Masing- masing pilar memiliki peran penting dalam memastikan bahwa revitalisasi ini tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis dan estetika, tetapi juga memperkuat aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kota Makassar.

Berdasarkan analisis pemangku kepentingan yang ditampilkan dalam tabel, program penanganan dan pengentasan kemiskinan ini melibatkan berbagai pihak dengan pengaruh dan kepentingan yang bervariasi. Sebagaimana yang telah peneliti utarakan akan urgensi melihat pemetaan stakeholder pada kategori-kategori pentahelix sebelum dipetakan menggunakan pendekatan *power & interest grid* dari Ackerman dan Eden, peneliti menemukan hanya ada dua kelompok yang peran dalam penanganan dan pengentasan stunting dari lima kelompok utama yang ada pada kategori pentahelix, yaitu pemerintah dan masyarakat.

Minimnya partisipasi kelompok akademisi, bisnis, dan media tidak pelak memiliki dampak negatif. Dalam konteks penanganan stunting, keberadaan kelompok akademisi, bisnis, dan media sangat penting untuk memastikan program yang holistik dan terintegrasi. Tanpa adanya akademisi, kualitas penelitian yang mendukung pengembangan intervensi penanganan stunting menjadi rendah. Grup akademis biasanya memiliki kemampuan untuk melakukan analisis mendalam dan menghasilkan data yang dapat diandalkan untuk mengidentifikasi penyebab stunting dan mengevaluasi efektivitas program. Akademisi dapat memberikan wawasan baru dan solusi inovatif untuk mengatasi masalah stunting. Tanpa masukan mereka, program-program yang ada mungkin tidak memanfaatkan perkembangan terbaru dalam ilmu gizi dan kesehatan.

Kehadiran sektor bisnis penting dalam mencari peluang investasi dalam program penanganan stunting. Tanpa partisipasi bisnis, sumber daya yang tersedia untuk mendukung program-program ini menjadi terbatas, yang dapat menghambat implementasi inisiatif yang lebih besar. Sektor swasta dapat menyediakan dana tambahan serta dukungan teknis. Tanpa keterlibatan bisnis, program penanganan stunting mungkin mengalami kendala dalam pendanaan yang cukup untuk menjalankan berbagai kegiatan.

Media memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi yang akurat dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya gizi dan bahaya stunting. Tanpa peran media, informasi yang sampai kepada masyarakat mungkin tidak memadai atau tidak tepat, sehingga sulit bagi masyarakat untuk memahami isu ini dengan benar. Media juga berperan dalam mobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program pencegahan stunting. Tanpa media, upaya untuk menarik perhatian masyarakat terhadap isu stunting dan memperkuat partisipasi mereka menjadi lemah.

Tanpa kolaborasi antara kelompok-kelompok ini, program penanganan stunting bisa menjadi terfragmentasi dan tidak terintegrasi. Misalnya, inisiatif pemerintah mungkin tidak selaras dengan upaya komunitas atau penelitian akademis, yang mengarah pada kebingungan dan inefisiensi dalam pelaksanaan program. Tanpa kolaborasi dengan akademisi dan bisnis, data tentang kebutuhan masyarakat dan strategi yang diterapkan bisa jadi tidak sinkron, mempengaruhi efektivitas upaya penanggulangan stunting.

Semua dampak di atas dapat menyebabkan penanganan stunting menjadi kurang efektif, yang pada gilirannya mengarah pada meningkatnya jumlah anak yang mengalami stunting. Ini dampak jangka panjang yang merugikan bagi kesehatan masyarakat, karena stunting berhubungan langsung dengan masa depan anak-anak. Anak-anak yang mengalami stunting berisiko lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan jangka panjang, mengurangi produktivitas mereka di masa dewasa. Dengan tidak adanya kolaborasi yang efektif, generasi mendatang mungkin akan memiliki potensi yang terhambat.

I. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar

Badan Perencanaan Daerah Kota Makassar berkomitmen untuk terus memantau dan merencanakan program-program yang dapat menurunkan angka stunting, Bappeda Kota Makassar berperan sebagai penghubung antara berbagai dinas pemerintah dan stakeholder lainnya untuk

mengkoordinasikan program-program yang berkaitan dengan peningkatan gizi anak. Koordinasi yang efektif membantu memfokuskan sumber daya dan meningkatkan efisiensi program, evaluasi terhadap pelaksanaan program pemulihan stunting.

Bappeda Kota Makassar dalam pengumpulan data yang akurat dan analisis yang mendalam sangat penting untuk menilai keberhasilan intervensi, serta untuk menyesuaikan rencana berdasarkan temuan yang diperoleh, dan Bappeda Kota Makassar juga memastikan bahwa dana cukup dialokasikan untuk program-program yang berfokus pada pemulihan stunting. Dengan mengarahkan anggaran dan sumber daya ke program gizi yang tepat, Bappeda Kota Makassar Kota Makassar berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Kota Makassar melalui pelatihan dan workshop. Bappeda Kota Makassar dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada kader kesehatan, petugas gizi, dan masyarakat tentang pentingnya nutrisi yang baik dan praktik penanganan stunting.

Bappeda Kota Makassar Kota Makassar dalam penanganan stunting banyak berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar Kota Makassar dan Dinas Pendidikan Kota Makassar. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh informan C.

“Kami melakukan kolaborasi yang erat dengan berbagai instansi, termasuk Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial Kota Makassar. Kami mengadakan pertemuan rutin untuk membahas strategi dan memastikan semua program berjalan secara sinkron. Misalnya, dalam program pemberian makanan tambahan, kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar untuk menentukan target penerima dan dengan Dinas Pendidikan untuk menyelaraskan kurikulum yang membahas gizi”

(20 Januari 2025)

Dalam perjalanan penanganan stunting di Kota Makassar, Bappeda Kota Makassar tidak pelak mengalami tantangan-tantangan yang lebih bersifat ke internalnya yaitu terbatasnya anggaran. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh informan C.

“Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan anggaran. Meskipun program-program ini sangat penting, kami sering kali dihadapkan pada realitas anggaran yang terbatas. Selain itu, tantangan dalam mengumpulkan data yang komprehensif dan akurat dari lapangan juga menjadi kendala dalam perencanaan yang lebih efektif. Ini mempengaruhi kemampuan kami untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan berbasis data.”

(20 Januari 2025)

Terdapatnya tantangan dalam penanganan stunting di Kota Makassar, tidak membuat Bappeda Kota Makassar kehilangan arah dalam penanganan tersebut bahkan Bappeda Kota Makassar berusaha memastikan bahwa program-program penanganan stunting sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh informan C.

“Kami melakukan pengumpulan data melalui survei dan studi lapangan untuk memahami kebutuhan masyarakat secara konkret. Selain itu, kami juga melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan melalui forum-forum diskusi, sehingga suara mereka didengar dan kebutuhan spesifik mereka dapat dipenuhi. Pendekatan partisipatif ini memastikan bahwa program yang kami rancang relevan dan efektif.”

(20 Januari 2025)

Lebih lanjutnya dalam upaya menyukseskan pengentasan stunting baik itu sebagai program nasional, program provinsi, dan juga program wali kota maka Bappeda Kota Makassar memiliki harapan agar di masa depannya penanganan stunting menjadi prioritas yang tercermin dalam adanya peningkatan alokasi anggaran dan adanya kolaborasi lintas sektor yang semakin padu. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh informan C.

"Harapan saya adalah agar penanganan stunting dapat menjadi prioritas di semua sektor dan bahwa semua pihak terkait bersatu untuk mencapainya. Kami ingin melihat adanya peningkatan kesadaran dan komitmen dari masyarakat serta dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah. Dengan kerjasama yang kuat antar sektor dan partisipasi aktif masyarakat, kami yakin dapat menurunkan angka stunting dan mempersiapkan generasi yang lebih sehat di masa depan."

(20 Januari 2025)

Secara regulasi, Bappeda Kota Makassar dalam perjalanannya mengentaskan stunting mengacu pada Peraturan Walikota Makassar Nomor 96 Tahun 2023 tentang Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting. Peraturan ini memberikan kepastian hukum dan menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Bappeda, dalam melaksanakan program penurunan stunting secara terintegrasi. Hal ini sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh informan C.

"Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2023 ini menjadi acuan hukum yang jelas bagi OPD, termasuk Bappeda, untuk menjalankan program-program penurunan stunting secara terintegrasi. Hal ini sangat penting karena kami memiliki banyak stakeholders yang terlibat, mulai dari sektor kesehatan hingga pendidikan dan sosial. Dengan adanya pedoman ini, setiap OPD dapat berkolaborasi lebih baik dan menyelaraskan kegiatan mereka dengan tujuan yang sama."

(20 Januari 2025)

Perwali No. 96 tahun 2023 tidak hanya menjadi landasan hukum tetapi juga menentukan peran dan tupoksi Bappeda dalam pengentasan stunting di Kota Makassar. Hal ini sebagaimana pernyataan informan C.

"Bappeda memiliki peran krusial dalam mengalokasikan anggaran untuk program-program intervensi pengendalian stunting. Kami memastikan bahwa dana dialokasikan untuk program gizi, kesehatan, dan pendidikan yang berfokus pada pengendalian stunting. Penganggaran ini didasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan melalui hasil analisis kebutuhan dan potensi yang ada."

(20 Januari 2025)

Peran Bappeda Kota Makassar yang berangkat dari Perwali No. 96 tahun 2023 kemudian turun menjadi program-program seperti "Diseminasi Penyusunan Data Stunting Berbasis Aplikasi", "Rapat Koordinasi Pelaksanaan Konvergensi Aksi Rembuk Stunting", "Evaluasi Kinerja Penurunan Stunting", dan "Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting". Hal ini sebagaimana pernyataan dari informan C.

"Program "Diseminasi Penyusunan Data Stunting Berbasis Aplikasi" dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memiliki data yang akurat dan terkini mengenai stunting di Kota Makassar. Dengan menggunakan aplikasi, kami bertujuan untuk mempermudah pengumpulan dan pembaruan data mengenai prevalensi stunting. Ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengakses informasi secara real-time dan mengambil keputusan berdasarkan data yang kesepakatan."

(20 Januari 2025)

"Rapat Koordinasi Pelaksanaan Konvergensi Aksi Rembuk Stunting merupakan forum strategis di mana berbagai stakeholder, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan DPPKB, berkumpul untuk merumuskan aksi dan program yang terintegrasi. Dalam rapat ini, kami mendiskusikan program yang sedang berjalan, tantangan yang dihadapi, serta merencanakan langkah-langkah selanjutnya untuk mempercepat penurunan angka stunting. Melalui koordinasi ini, kami berharap semua pihak dapat bergerak dalam satu visi yang sama."

(20 Januari 2025)

II. Dinas Kesehatan Kota Makassar

Dinas Kesehatan Kota Makassar memiliki beberapa tugas utama yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, termasuk kebijakan dan program yang ditujukan untuk

meningkatkan gizi dan kesehatan, serta mengurangi angka stunting. Dinas Kesehatan Kota Makassar Kota Makassar melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi yang baik, praktik pemberian makanan yang tepat, serta perawatan kesehatan ibu dan anak. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko stunting dan bagaimana cara mencegahnya.

Dinas Kesehatan Kota Makassar Kota Makassar pun melaksanakan program pemberian makanan tambahan bagi kelompok rentan, seperti ibu hamil, menyusui, dan anak balita yang mengalami kekurangan gizi. Kader kesehatan masyarakat yang dilatih oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar Kota Makassar berperan penting dalam penyuluhan kepada masyarakat. Mereka dilatih untuk memberikan informasi tentang pentingnya nutrisi, cara memasak makanan bergizi, dan praktik pemberian makan yang baik. Keterlibatan kader kesehatan di tingkat posyandu sangat vital dalam menjangkau ibu-ibu dan keluarga di komunitas. Dinas Kesehatan Kota Makassar rutin melaksanakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gizi seimbang dan pencegahan stunting. Melalui berbagai media, seperti media sosial, poster, dan seminar, Dinas Kesehatan Kota Makassar berupaya menjangkau masyarakat luas untuk memberikan informasi yang akurat dan mudah dipahami.

Kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar Kota Makassar ada pada dua instansi dinas dan satu badan yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Sosial Kota Makassar, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh informan A.

"Kami bekerja sama dengan berbagai instansi seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial Kota Makassar, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Kota Makassar). Misalnya, dengan Dinas Pendidikan, kami mengintegrasikan program kesehatan dan gizi ke dalam kurikulum sekolah untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai pentingnya nutrisi. Dengan Dinas Sosial Kota Makassar, kami berjalan bersama dalam program bantuan sosial untuk keluarga yang berisiko tinggi mengalami stunting, sehingga kami bisa menjangkau mereka secara lebih efektif."

(15 Januari 2025)

Pada kolaborasi antar dinas tersebut, komunikasi menjadi tantangan terbesar. Hal ini memiliki dampak negatif yaitu adanya tumpang tindih kerja bahkan pada berhentinya inisiatif untuk menjalankan program pengetasan stunting itu sendiri. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh informan A.

"Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya komunikasi yang efektif antar instansi. Dalam beberapa kasus, program yang dirancang oleh satu instansi tidak selalu terkoordinasi dengan baik dengan program instansi lain, sehingga mengakibatkan tumpang tindih atau penghentian inisiatif yang mungkin saling mendukung. Selain itu, perbedaan prioritas dan anggaran antara instansi juga menjadi kendala. Kami sering kali harus berjuang untuk mendapatkan dukungan anggaran yang memadai untuk program-program kesehatan yang kami jalankan."

(15 Januari 2025)

Upaya menangani tantangan tersebut, Dinas Kesehatan Kota Makassar kemudian pertemuan rutin antar instansi. Pertemuan rutin tersebut diharapkan dapat menjadi ruang untuk saling berbagi temuan lapangan, ruang reflektif dari program-program yang dijalankan, dan menjadi ruang merumuskan program baru yang dapat mempercepat pengentasan stunting di Kota Makassar. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh informan A.

"Kami berusaha untuk meningkatkan komunikasi dengan mengadakannya pertemuan rutin dengan seluruh stakeholder terkait. Dengan mengumpulkan semua pihak dalam forum diskusi, kami dapat mendengar dan memahami perspektif mereka dan mencari solusi bersama. Kami juga menjalankan pelatihan bagi kader kesehatan dan petugas di lapangan untuk memastikan bahwa informasi dan tujuan kami selaras dengan tujuan instansi lain"

(15 Januari 2025)

Dinas Kesehatan Kota Makassar Kota Makassar sebagai garda terdepan dalam pengentasan stunting di Kota Makassar memiliki harapan adanya kemitraan yang lebih solid

dan berkelanjutan antar instansi yang ada di Pemerintahan Kota Makassar. Bahkan lebih dari, diharapkan adanya pihak-pihak eksternal OPD Kota Makassar seperti NGO dan lembaga masyarakat sipil yang turut andil dalam pengentasan stunting di Kota Makassar. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh informan A.

"Harapan kami adalah terbentuknya kemitraan yang lebih solid dan berkelanjutan antara semua instansi dalam penanganan stunting. Dengan saling mendukung dan melengkapi satu sama lain, saya yakin kita bisa lebih efektif dalam mengurangi angka stunting. Kami ingin melihat adanya perubahan nyata dan berkelanjutan dalam status gizi anak-anak di Kota Makassar, serta mendukung mereka untuk tumbuh sehat dan memiliki masa depan yang lebih baik."

(15 Januari 2025)

Secara regulasi, Dinas Kesehatan Kota Makassar dalam upaya mengentaskan stunting mengacu pada Peraturan Walikota Makassar Nomor 96 Tahun 2023 tentang Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting. Peraturan ini memberikan kepastian hukum dan menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Kesehatan, dalam melaksanakan program penurunan stunting secara terintegrasi. Hal ini sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh informan A.

"Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2023 merupakan langkah maju yang sangat signifikan dalam penanganan stunting di Kota Makassar. Dengan adanya peraturan ini, kami dapat memastikan bahwa semua kegiatan dan program yang diimplementasikan untuk menurunkan stunting di wilayah kami menjadi lebih terstruktur dan fokus."

(15 Januari 2025)

Perwali No. 96 tahun 2023 tidak hanya menjadi landasan hukum tetapi juga menentukan peran dan tupoksi Dinas Kesehatan dalam pengentasan stunting di Kota Makassar. Hal ini sebagaimana pernyataan informan A.

"Peran Dinas Kesehatan dalam pengentasan stunting secara garis besar ada lima yaitu: Pertama, menganalisis data terkait status gizi dan pertumbuhan anak di Kota Makassar, termasuk prevalensi stunting. Kedua, melakukan survei dan penelitian untuk memahami faktor-faktor penyebab stunting di Kota Makassar. Ketiga, Menyusun rencana strategis untuk penanganan stunting berdasarkan data yang diperoleh. Rencana ini mencakup intervensi gizi, program pendidikan kesehatan, dan peningkatan pelayanan kesehatan. Keempat, mengembangkan program-program berbasis bukti yang ditujukan untuk mengurangi angka stunting. Kelima, menginisiasi program penyuluhan mengenai pentingnya gizi seimbang, kesehatan reproduksi, dan perawatan anak kepada orang tua dan masyarakat umum."

(15 Januari 2025)

Peran Dinas Kesehatan yang berangkat dari Perwali No. 96 tahun 2023 kemudian turun menjadi program-program Dinas Kesehatan seperti "Grebek Stunting", "Sosialisasi Pencegahan Stunting", "Pemantauan Pertumbuhan Anak", dan "Pelatihan Pemberian Makanan Bayi dan Anak". Hal ini sebagaimana pernyataan dari informan A.

"Dinas Kesehatan memiliki beberapa program unggulan dalam pengentasan stunting yaitu "Grebek Stunting", "Sosialisasi Pencegahan Stunting", "Pemantauan Pertumbuhan Anak", dan "Pelatihan Pemberian Makanan Bayi dan Anak". Program ini adalah inisiatif kami untuk melakukan serangkaian kegiatan langsung ke lapangan di komunitas yang memiliki angka stunting tinggi. Tujuannya adalah untuk mendeteksi dan mengidentifikasi anak-anak yang terkena dampak stunting serta melakukan intervensi awal. Dalam program ini, kami juga mengedukasi orang tua tentang pentingnya gizi dan pola makanan yang baik."

(15 Januari 2025)

III. Dinas Sosial Kota Makassar Kota Makassar

Dinas Sosial Kota Makassar Kota Makassar memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak yang mengalami stunting. Dinas Sosial Kota Makassar Kota Makassar berperan dalam menyalurkan berbagai bentuk bantuan sosial kepada masyarakat, termasuk program yang secara langsung mendukung pemulihan gizi anak. Ini mencakup bantuan pangan, program keluarga harapan (PKH), dan bantuan lainnya yang ditujukan untuk keluarga yang berisiko tinggi mengalami stunting. Dinas Sosial Kota Makassar Kota Makassar juga diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi yang seimbang. Penyuluhan tentang pola makan sehat, perawatan anak, dan pentingnya gizi yang baik selama 1.000 hari pertama kehidupan menjadi fokus utama.

Dinas Sosial Kota Makassar Kota Makassar berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan berbagai program penanganan stunting. Mereka berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dinas Pendidikan, dan lembaga lain untuk memastikan bahwa program berjalan dengan baik dan saling mendukung. Hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh informan B.

"Dinas Sosial Kota Makassar bertanggung jawab untuk mengimplementasikan program-program sosial yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk penanganan stunting. Salah satu program utama kami adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar, termasuk gizi anak. Kami juga bekerja untuk memberikan konsultasi dan dukungan kepada keluarga tentang pemenuhan gizi yang baik bagi anak-anak."

(24 Januari 2025)

Salah satu program utama yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Makassar Kota Makassar adalah penyaluran bantuan pangan. Bantuan ini sering kali diberikan dalam bentuk bahan makanan bergizi, seperti beras, susu, dan makanan tambahan lainnya. Program ini ditujukan khusus untuk keluarga yang memiliki anak di bawah lima tahun yang terindikasi mengalami stunting. Dengan memastikan akses keluarga terhadap pangan yang bergizi, diharapkan dapat memperbaiki status gizi anak dan mencegah terjadinya stunting.

Dinas Sosial Kota Makassar Kota Makassar juga bertanggung jawab untuk melakukan pendampingan keluarga-keluarga yang berisiko mengalami stunting. Melalui program pendampingan, Dinas Sosial Kota Makassar Kota Makassar melibatkan kader kesehatan dan pekerja sosial untuk bekerja sama dengan masyarakat dalam memberikan edukasi, memantau pertumbuhan anak, dan memberikan dukungan emosional kepada keluarga. Pendampingan ini penting agar keluarga merasa didukung dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana memberikan perawatan yang baik bagi anak-anak mereka. Hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh informan B.

"Kami memiliki beberapa program yang secara langsung berkontribusi pada penanganan stunting. Pertama, program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang ditujukan untuk anak-anak balita dan ibu hamil. Kedua, kami juga melaksanakan penyuluhan tentang kesehatan gizi di tingkat posyandu, di mana kader kesehatan memberikan informasi dan edukasi kepada orang tua tentang pemberian makanan bergizi dan pentingnya pemantauan pertumbuhan anak. Selain itu, kami melakukan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas kader di masyarakat agar mereka dapat lebih efektif dalam menyampaikan informasi."

(24 Januari 2025)

Dinas Sosial Kota Makassar Kota Makassar secara aktif melakukan penyuluhan mengenai pentingnya gizi bagi tumbuh kembang anak. Dengan menjangkau komunitas melalui berbagai program, Dinas Sosial Kota Makassar Kota Makassar membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang faktor-faktor yang menyebabkan stunting dan pentingnya pola makan sehat.

Kegiatan penyuluhan ini tidak hanya dilakukan di posyandu, tetapi juga melibatkan lokalitas seperti pertemuan keluarga dan kelompok masyarakat, untuk memastikan bahwa informasi tentang gizi dan kesehatan tersebar luas dan mudah dipahami. Dinas Sosial Kota Makassar memegang peran yang penting dalam praktik penanganan stunting melalui berbagai program penyaluran bantuan, pendidikan, dan kolaborasi lintas sektor. Dengan memenuhi fungsi-fungsi tersebut, Dinas Sosial Kota Makassar dapat berkontribusi secara signifikan dalam menurunkan angka stunting di Kota Makassar.

Pada upayanya menyukseskan program penanganan pengentasan stunting tersebut, Dinas Sosial Kota Makassar kemudian berkolaborasi secara intens dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar dan Dinas Pendidikan. Hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh informan B.

"Dinas Kesehatan Kota Makassar adalah partner utama kami dalam penanganan stunting. Kami bekerja sama dalam kegiatan pembagian makanan tambahan dan pemantauan status gizi anak melalui posyandu. Selain itu, kami juga berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dalam integrasi program gizi ke dalam kurikulum di sekolah. Kami mengadakan rapat koordinasi secara berkala untuk memastikan bahwa semua program berjalan lancar dan saling mendukung satu sama lain."

(24 Januari 2025)

Dalam masa berjalannya program penanganan pengentasan stunting, Dinas Sosial Kota Makassar menghadapi tantangan, dan tantangan terbesarnya adalah komunikasi efektif antara instansi yang terkait dengan program tersebut. Hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh informan B.

"Salah satu tantangan terbesar adalah komunikasi yang efektif antara instansi. Terkadang, ada perbedaan dalam prioritas program dan alokasi anggaran yang dapat menyebabkan kesulitan dalam merumuskan rencana kolaborasi yang baik. Selain itu, kami juga menghadapi keterbatasan sumber daya, seperti anggaran yang mungkin tidak memadai untuk menjangkau semua keluarga yang membutuhkan. Selain itu, kurangnya data yang akurat mengenai status gizi anak juga menjadi tantangan dalam perencanaan program yang lebih tepat."

(24 Januari 2025)

Walaupun demikian dalam menghadapi tantangan komunikasi efektif tersebut, Dinas Sosial Kota Makassar tetap berupaya mencari solusi dengan intens melakukan pertemuan di tingkat koordinasi antar instansi. Hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh informan B.

"Kami berusaha meningkatkan komunikasi dengan melakukan pertemuan rutin di tingkat koordinasi antar instansi. Dalam forum tersebut, kami berbagi informasi terkait data dan kebutuhan di lapangan, sehingga semua pihak dapat memahami gambaran keseluruhan. Kami juga mencari kesempatan untuk mendapatkan dukungan tambahan dari pihak swasta atau lembaga donor untuk mengatasi keterbatasan anggaran. Selain itu, kami berusaha untuk melakukan pemetaan data yang lebih baik di tingkat komunitas dengan melibatkan kader kesehatan."

(24 Januari 2025)

Sebagai instansi yang memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk kelompok rentan, maka Dinas Sosial Kota Makassar memiliki harapan agar di masa depan ada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dan kesehatan anak. Hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh informan B.

"Harapan kami adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dan kesehatan anak, serta memastikan bahwa semua anak di Kota Makassar dapat tumbuh dengan sehat. Kami juga berharap agar kolaborasi antar instansi semakin solid, dengan dukungan dari semua pihak, sehingga program-program yang kami jalankan dapat lebih efektif dan menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan. Dengan sinergi yang kuat, kami yakin bisa menurunkan angka stunting di kota ini."

(24 Januari 2025)

Secara regulasi, Dinas Sosial Kota Makassar dalam perjalanannya mengentaskan stunting mengacu pada Peraturan Walikota Makassar Nomor 96 Tahun 2023 tentang Konvergensi

Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting. Peraturan ini memberikan kepastian hukum dan menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Sosial, dalam melaksanakan program penurunan stunting secara terintegrasi. Hal ini sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh informan B.

“Beberapa aspek penting dalam Peraturan Walikota No. 96 Tahun 2023 ini mencakup pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antara berbagai OPD. Selain itu, ada penekanan pada pentingnya data dan informasi yang akurat untuk perencanaan dan evaluasi program. Pemantauan berkala dan pelaporan juga menjadi poin penting untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan dengan baik.”

(24 Januari 2025)

Perwali No. 96 tahun 2023 tidak hanya menjadi landasan hukum tetapi juga menentukan peran dan tupoksi Dinas Sosial dalam pengentasan stunting di Kota Makassar. Hal ini sebagaimana pernyataan informan B.

“Dinas Sosial Kota Makassar memiliki tanggung jawab yang penting dalam mengatasi masalah stunting melalui beberapa program kerja. Di antaranya adalah program Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Program Bapak Asuh Stunting. Dengan tujuan untuk memberikan dukungan kepada keluarga yang mengalami kesulitan, khususnya yang memiliki anak Stunting. Kami menyediakan intervensi dalam bentuk bantuan sosial, pendampingan, dan fasilitas untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Dengan memberikan akses kepada layanan, kami berharap keluarga dapat memenuhi kebutuhan gizi yang memadai bagi anak-anak mereka, sehingga mengurangi risiko stunting.”

(24 Januari 2025)

Peran Dinas Sosial Kota Makassar yang berangkat dari Perwali No. 96 tahun 2023 kemudian turun menjadi program-program seperti “Rehabilitasi Sosial”, “Perlindungan dan Jaminan Sosial”, serta “Program Bapak Asuh Stunting”. Hal ini sebagaimana pernyataan dari informan B.

“Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sangat krusial dalam memastikan bahwa kelompok rentan, termasuk ibu dan anak, mendapatkan perlindungan dari kemungkinan kerentanan sosial. Dalam konteks stunting, kami berusaha memberikan jaminan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta dukungan finansial dalam bentuk bantuan untuk keluarga miskin yang diprioritaskan. Ini menjadi upaya preventif agar anak-anak mendapatkan nutrisi yang baik dan terhindar dari stunting.”

(24 Januari 2025)

“Program Bapak Asuh Stunting adalah inisiatif yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat, khususnya para dermawan atau donatur, dalam upaya pencegahan stunting. Dalam program ini, para donatur atau “bapak asuh” diharapkan memberikan dukungan berupa dana, bantuan bahan makanan bergizi, ataupun bantuan pendidikan untuk anak-anak yang terancam stunting. Selain itu, para sukarelawan juga akan dilibatkan dalam kegiatan penyuluhan gizi yang diperlukan oleh keluarga, serta memantau perkembangan anak-anak tersebut”

(24 Januari 2025)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar Salah satu instansi pemerintah yang berperan penting dalam praktik pemulihan stunting adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB Kota Makassar) Kota Makassar. DPPKB Kota Makassar Kota Makassar bertugas menyusun dan melaksanakan program KB yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas keluarga. Program ini seringkali berhubungan erat dengan kesehatan ibu dan anak.

DPPKB Kota Makassar Kota Makassar juga melaksanakan penyuluhan dan pendidikan kesehatan reproduksi bagi masyarakat, termasuk tentang pentingnya gizi yang baik selama masa kehamilan dan menyusui. Hal ini sebagaimana pemaparan dari informan F

"Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berperan penting dalam penanganan stunting melalui program-program yang mendukung keluarga dalam merencanakan jumlah anak serta memastikan bahwa anak-anak mendapatkan gizi yang cukup. Kami melakukan penyuluhan mengenai pentingnya gizi yang baik bagi ibu hamil dan menyusui, serta memfasilitasi program Keluarga Berencana (KB) yang memungkinkan keluarga mengatur jumlah anak sehingga mereka dapat lebih fokus pada asupan gizi dan kesehatan anak."

(17 Januari 2025)

Program KB yang dikembangkan oleh DPPKB Kota Makassar bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri merencanakan keluarga mereka dengan baik. Pengendalian jumlah anak yang ideal memungkinkan keluarga untuk lebih fokus pada kesehatan dan nutrisi anak. Dengan demikian, program ini berkontribusi terhadap peningkatan status gizi anak. Misalnya, keluarga yang memiliki anak dalam jumlah yang lebih sedikit dapat lebih mudah mencukupi kebutuhan gizi dan perawatan setiap anak.

DPPKB Kota Makassar Kota Makassar mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya gizi yang baik selama kehamilan dan lactasi. Penyuluhan tentang nutrisi bagi ibu hamil dan menyusui sangat vital untuk mendukung perkembangan janin dan anak. Gizi yang buruk selama periode ini dapat menjadi faktor utama terjadinya stunting. DPPKB Kota Makassar Kota Makassar sering kali mengadakan kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan seminar untuk memberikan informasi terkini tentang pola makan yang sehat dan kekhawatiran gizi yang dapat memengaruhi pertumbuhan anak. Hal ini sebagaimana pemaparan dari informan F

"Kami memiliki beberapa program yang relevan dengan penanganan stunting. Pertama, program Keluarga Berencana (KB) yang bertujuan untuk mengontrol pertumbuhan penduduk dan membantu pasangan suami istri merencanakan keluarga mereka. Dengan mengatur jarak kelahiran, keluarga dapat memberi perhatian lebih kepada setiap anak. Kedua, kami juga menjalankan program edukasi kesehatan reproduksi, di mana kami mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi selama kehamilan dan menyusui. Ketiga, kami aktif dalam kampanye kebersihan dan sanitasi, yang juga mempengaruhi kesehatan dan gizi anak."

(17 Januari 2025)

DPPKB Kota Makassar Kota Makassar bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar Kota Makassar untuk mengintegrasikan penyuluhan nutrisi ke dalam kegiatan posyandu (pos pelayanan terpadu). Posyandu menjadi tempat penting untuk memantau pertumbuhan anak dan memberikan edukasi gizi kepada orang tua. Di sini, kader-kader kesehatan yang dilatih oleh DPPKB Kota Makassar dapat meneruskan informasi dan memberikan panduan tentang pentingnya memberikan makanan bergizi. Penyuluhan tersebut bisa mencakup cara memilih dan mengolah makanan sehat supaya anak mendapatkan gizi yang cukup.

DPPKB Kota Makassar Kota Makassar tidak hanya fokus pada program KB, tetapi juga memberikan pendampingan kepada keluarga dalam aspek kesehatan reproduksi dan gizi. Pendampingan ini meliputi bimbingan tentang pola asuh anak, perawatan kesehatan, dan pemenuhan gizi. Melalui program ini, DPPKB Kota Makassar membantu memastikan bahwa orang tua melakukan tindakan preventif untuk mendukung pertumbuhan anak yang sehat.

Dalam perjalanan menyukseskan program pengentasan stunting di Kota Makassar, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar bekerja sama dengan berbagai instansi terutama Dinas Kesehatan Kota Makassar dan Dinas Sosial Kota Makassar. Hal ini sebagaimana pemaparan dari informan F

"Kami bekerja sama dengan berbagai instansi, terutama Dinas Kesehatan Kota Makassar dan Dinas Sosial Kota Makassar. Dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar, kami berkolaborasi dalam program-program pemantauan kesehatan ibu dan anak. Kami juga berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan di posyandu. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Makassar membantu kami memahami status gizi"

masyarakat. Sedangkan dalam kolaborasi dengan Dinas Sosial Kota Makassar, kami turut dalam program bantuan sosial yang menyoal keluarga miskin untuk memastikan bahwa bantuan tersebut juga mencakup aspek gizi anak."

(17 Januari 2025)

Komunikasi efektif antar instansi menjadi tantangan utama dalam kerja sama antar instansi. Hal ini sebagaimana pemaparan dari informan F

"Salah satu tantangan utama adalah kurangnya komunikasi yang efektif antara instansi. Terkadang, data yang kami miliki tidak sinkron dengan data yang dimiliki dari instansi lain, sehingga mempersulit perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu, kami juga mengalami kendala dalam hal anggaran, di mana seringkali alokasi dana untuk program-program kami terbatas. Hal ini menghambat kapasitas kami untuk menjangkau lebih banyak keluarga dalam program-program yang kami jalankan."

(17 Januari 2025)

Komunikasi efektif menjadi sebuah permasalahan dikarenakan beberapa sebab, yaitu: Pertama, setiap instansi memiliki struktur organisasi, budaya kerja, dan cara pengambilan keputusan yang berbeda. Hal ini dapat menghambat aliran informasi yang lancar. Kedua, setiap instansi sering menggunakan istilah teknis dan jargon spesifik yang sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Perbedaan ini dapat menyebabkan kebingungan dan salah pengertian antara instansi yang berbeda. Misalnya, istilah yang digunakan dalam kesehatan mungkin tidak dipahami oleh pihak yang memiliki latar belakang sosial atau pendidikan, yang dapat mengakibatkan kesalahpahaman dalam kolaborasi. Ketiga, banyak instansi menghadapi keterbatasan waktu dan sumber daya, yang dapat mengurangi kemampuan mereka untuk berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif. Kesibukan dengan tugas sehari-hari dapat mengakibatkan kurangnya fokus dan perhatian terhadap komunikasi lintas instansi. Ketika waktu terbatas, komunikasi kadang kala dianggap sebagai prioritas yang lebih rendah. Keempat, tidak semua pegawai atau kader di instansi pemerintah dilatih dalam keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Kurangnya pelatihan ini dapat menyebabkan kegagalan dalam menyampaikan pesan atau gagasan secara jelas dan efektif, yang dapat menghambat pemahaman. dan Kelima, Setiap instansi mungkin memiliki sudut pandang yang berbeda tentang masalah yang ada dan cara terbaik untuk mengatasinya.

Ketika ada perbedaan dalam pemahaman mengenai masalah atau prioritas tindakan, hal ini dapat menciptakan tantangan dalam mencapai kesepakatan mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam kolaborasi. Namun, tantangan tersebut tidak kemudian membuat Dinas PPKB Kota Makassar terdistraksi dan mengalihkan fokusnya. Dinas PPKB kemudian berusaha untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Hal ini sebagaimana pemaparan dari informan F

"Kami berusaha untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan mengadakan pertemuan rutin antara instansi terkait. Dalam forum tersebut, kami membahas issue-issue yang relevan dan mencari solusi bersama. Kami juga berupaya untuk melakukan pemetaan yang lebih baik terhadap data masyarakat yang berkaitan dengan gizi dan kesehatan untuk memastikan keputusan yang diambil berbasis data yang akurat. Selain itu, kami mencari inovasi dalam pemanfaatan sumber daya, termasuk menggandeng sektor swasta atau lembaga donor untuk meningkatkan pendanaan program."

(17 Januari 2025)

Dinas PPKB Kota Makassar dalam program penanganan pengentasan stunting ini kemudian memiliki harapan agar adanya kerja sama tidak hanya di tingkat OPD tetapi juga turun ke tingkat masyarakat. Hal ini sebagaimana pemaparan dari informan F

"Harapan kami adalah agar semua pihak, terutama pemerintah dan masyarakat, bisa bersama-sama berkomitmen untuk mengurangi angka stunting. Kami ingin melihat peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi yang baik dan perencanaan keluarga, serta dukungan yang lebih baik dari instansi pemerintah lain. Melalui kolaborasi yang solid dan program-program yang terfokus,

kami percaya bahwa kami dapat mencapai penurunan signifikan dalam angka stunting di Kota Makassar”

(17 Januari 2025)

Secara regulasi, DPPKB Kota Makassar dalam perjalanannya mengentaskan stunting mengacu pada Peraturan Walikota Makassar Nomor 96 Tahun 2023 tentang Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting. Peraturan ini memberikan kepastian hukum dan menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk DPPKB, dalam melaksanakan program penurunan stunting secara terintegrasi. Hal ini sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh informan F.

“Peraturan Walikota No. 96 Tahun 2023 merupakan pedoman penting bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar dalam melaksanakan program-program yang bertujuan untuk mengatasi stunting. Regulasi ini menetapkan tujuan yang jelas untuk pengentasan stunting, termasuk penurunan prevalensi stunting secara signifikan di kalangan anak-anak di Kota Makassar. Ini menjadikan pengentasan stunting sebagai prioritas utama dalam program-program DPPKB.”

(17 Januari 2025)

Perwali No. 96 tahun 2023 tidak hanya menjadi landasan hukum tetapi juga menentukan peran dan tupoksi DPPKB dalam pengentasan stunting di Kota Makassar. Hal ini sebagaimana pernyataan informan F.

“Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar berperan penting dalam upaya pengentasan stunting. Kami melakukan berbagai intervensi untuk memastikan bahwa keluarga memiliki akses kepada informasi dan layanan yang dibutuhkan untuk mencegah stunting pada anak.”

(17 Januari 2025)

Peran Dinas Sosial Kota Makassar yang berangkat dari Perwali No. 96 tahun 2023 kemudian turun menjadi program-program seperti “Program Penyuluhan Gizi.”, “Program Bapak Asuh Stunting”, serta “Pelayanan Keluarga Berencana”. Hal ini sebagaimana pernyataan dari informan F.

Kami mengadakan sesi penyuluhan di tingkat komunitas untuk mengedukasi orang tua tentang pentingnya nutrisi seimbang bagi anak-anak. Kami juga memberikan informasi mengenai pola makan yang sehat dan kebiasaan baik dalam hal gizi.

(17 Januari 2025)

Kami juga memfasilitasi akses metode kontrasepsi yang efektif untuk mengatur jumlah kelahiran dalam keluarga. Dengan perencanaan keluarga yang baik, diharapkan keluarga dapat lebih fokus dalam memenuhi kebutuhan gizi anak yang sudah ada.

(17 Januari 2025)

IV. Puskesmas Sudiang

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk dalam menangani masalah stunting. Puskesmas memberikan layanan kesehatan yang sangat penting untuk ibu hamil, menyusui, dan anak (balita). Salah satu program utamanya adalah pemeriksaan kesehatan secara berkala, yang mencakup pengukuran tinggi badan dan berat badan anak untuk memantau pertumbuhan mereka. Dengan mendeteksi masalah gizi dan pertumbuhan sejak dini, tim kesehatan di Puskesmas dapat memberikan intervensi yang diperlukan untuk mencegah terjadinya stunting.

Puskesmas memiliki program pemberian makanan tambahan bagi anak-anak yang mengalami kekurangan gizi. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak dan membantu pemulihan status gizinya. Selain itu, Puskesmas juga memberikan suplementasi vitamin dan mineral, seperti vitamin A dan zat besi, yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) yang dioperasikan oleh Puskesmas merupakan salah satu program unggulan dalam pemantauan status gizi anak. Di Posyandu, orang tua dapat memeriksakan

berat dan tinggi anak mereka secara rutin. Puskesmas juga memberikan penyuluhan tentang cara pemberian makanan yang baik serta pentingnya gizi seimbang bagi pertumbuhan anak. Melalui Posyandu, kader kesehatan yang terdiri dari anggota masyarakat yang terlatih dapat memberikan informasi dan dukungan langsung kepada keluarga, sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gizi dan kesehatan. Hal ini sebagaimana pernyataan dari informan D

"Kami memiliki beberapa program yang khusus diarahkan untuk menangani stunting. Salah satu program utama adalah Posyandu, di mana kami melakukan pemantauan berat badan dan tinggi badan anak secara rutin. Di Posyandu, kami juga memberikan makanan tambahan bagi anak-anak di bawah usia lima tahun yang mengalami kekurangan gizi. Selain itu, kami menyelenggarakan program penyuluhan gizi, di mana kami mendidik orang tua tentang nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan anak yang sehat. Kami juga terlibat dalam kampanye imunisasi untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan vaksin yang mereka perlukan untuk mencegah penyakit yang dapat memengaruhi status gizi mereka."

(30 Januari 2025)

Puskesmas memiliki tanggung jawab untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak di wilayah kerjanya. Melalui pemantauan berkala, Puskesmas dapat mengidentifikasi anak-anak yang mengalami masalah gizi dan stunting. Data yang dikumpulkan dalam pemantauan ini sangat penting untuk evaluasi program dan perencanaan intervensi yang lebih efektif. Puskesmas juga dapat memberikan rujukan kepada layanan kesehatan lanjut jika diperlukan. Hal ini sebagaimana pernyataan dari informan D

"Puskesmas memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan stunting di Kota Makassar. Sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat, kami bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan pertumbuhan anak, memberikan pelayanan kesehatan dasar, serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya gizi yang baik, terutama bagi ibu hamil dan anak-anak. Kami juga memfasilitasi program-program yang bertujuan untuk mencegah dan menangani stunting secara langsung."

(30 Januari 2025)

Puskesmas memberikan pelatihan kepada kader kesehatan di masyarakat mengenai isu-isu gizi dan kesehatan anak. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kader dalam memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada keluarga. Kader kesehatan yang terlatih dapat menjadi agen perubahan di masyarakat, membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang gizi, serta memberikan dukungan langsung kepada keluarga dalam merawat anak mereka.

Puskesmas menjadi mesin penggerak yang turun ke masyarakat secara langsung. Karena posisi tersebut, Puskesmas kemudian berkoordinasi dengan tiga instansi yaitu Dinas Sosial Kota Makassar, Dinas Kesehatan Kota Makassar, dan Dinas Pendidikan. Hal ini sebagaimana pernyataan dari informan D

"Kami berkolaborasi erat dengan berbagai instansi pemerintah, termasuk Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dinas Sosial Kota Makassar, dan Dinas Pendidikan. Dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar, kami berbagi data terkait status gizi anak dan melakukan koordinasi dalam program kesehatan. Dinas Sosial Kota Makassar mendukung kami dalam mengidentifikasi keluarga miskin yang membutuhkan bantuan gizi, sementara Dinas Pendidikan berperan dalam mengintegrasikan program kesehatan dan gizi ke dalam kurikulum sekolah. Kolaborasi ini sangat penting agar masing-masing program dapat saling mendukung dan memberikan dampak yang lebih besar."

(30 Januari 2025)

Koordinasi dengan tiga instansi tersebut tentu saja mengalami tantangannya. Adapun dua bentuk tantangan tersebut dalam koordinasi dengan tiga instansi tersebut. Hal ini sebagaimana pernyataan dari informan D

"Kami menghadapi beberapa tantangan dalam menjalin kolaborasi. Pertama, ada masalah komunikasi yang bisa mengakibatkan ketidaksinkronan dalam program-program yang dijalankan. Misalnya, kami mungkin memiliki data yang berbeda tentang prevalensi stunting di lapangan, yang mengarah pada kebingungan dalam perencanaan program. Selain itu, keterbatasan anggaran untuk program kesehatan sering kali menjadi penghalang dalam pengadaan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan inisiatif secara efektif. Sering kali kami juga merasa perlu lebih banyak sumber daya manusia untuk mengelola kegiatan secara maksimal."

(30 Januari 2025)

Upaya untuk meretas tantangan tersebut telah dilakukan dengan mengadakan diskusi terbuka dan pertemuan rutin. Sedangkan untuk tantangan anggaran, Puskesmas kemudian aktif untuk mencari dukungan dari sektor swasta atau lembaga donor. Hal ini sebagaimana pernyataan dari informan D

"Kami berusaha untuk meningkatkan komunikasi dengan instansi lain melalui pertemuan rutin dan diskusi terbuka yang melibatkan semua pihak terkait. Kami juga melakukan pemantauan data secara bersinergi untuk memastikan semua pihak memiliki informasi yang akurat dan up-to-date. Jika terkait dengan masalah anggaran, kami aktif mencari dukungan dari sektor swasta atau lembaga donor untuk mendapatkan tambahan dana guna mendukung program-program kami. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk staf kami juga diupayakan agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik."

(30 Januari 2025)

Puskesmas dengan segala keterbatasan dan tantangan yang dihadapi berharap agar penanganan stunting menjadi prioritas bersama yang dijalankan secara solid. Harapan ini berdasarkan realita lapangan dimana masih adanya ego sektoral dan masyarakat yang terdampak kerap kali tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan. Hal ini sebagaimana pernyataan dari informan D

"Harapan kami adalah agar penanganan stunting bisa menjadi prioritas utama di berbagai sektor, dan kolaborasi antara instansi dapat semakin solid. Dengan adanya dukungan dan keterlibatan masyarakat yang lebih besar, kami percaya bahwa kami dapat menurunkan angka stunting dengan signifikan. Kami juga berharap agar masyarakat lebih menyadari pentingnya gizi dan kesehatan, sehingga semua anak di Kota Makassar dapat tumbuh dengan baik dan sehat."

(30 Januari 2025)

Secara regulasi, Puskesmas dalam perjalanannya mengentaskan stunting mengacu pada Peraturan Walikota Makassar Nomor 96 Tahun 2023 tentang Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting. Peraturan ini memberikan kepastian hukum dan menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Puskesmas, dalam melaksanakan program penurunan stunting secara terintegrasi. Hal ini sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh informan D.

"Puskesmas memiliki posisi yang sangat strategis dalam melaksanakan Peraturan Walikota tersebut. Sesuai dengan regulasi ini, kami bertanggung jawab untuk menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan dan gizi bagi masyarakat, khususnya ibu hamil dan anak-anak."

(1 Februari 2025)

"Fokus utama kami adalah melakukan pemantauan tumbuh kembang anak dan memberikan intervensi gizi yang tepat. Kami melakukan pemeriksaan rutin terhadap anak balita untuk menilai tinggi dan berat badannya, serta memberikan edukasi kepada orang tua mengenai asupan gizi yang baik."

(1 Februari 2025)

Dalam melaksanakan program pengentasan stunting di Kota Makassar. Puskesmas berfokus pada upaya-upaya preventif. Hal ini sebagaimana pernyataan informan D.

“Fokus utama kami adalah melakukan pemantauan tumbuh kembang anak dan memberikan intervensi gizi yang tepat. Kami melakukan pemeriksaan rutin terhadap anak balita untuk menilai tinggi dan berat badannya, serta memberikan edukasi kepada orang tua mengenai asupan gizi yang baik.

(1 Februari 2025)

Dengan spirit preventif yang ada pada tubuh Puskesmas, program-program kegiatannya berkisar pada langkah-langkah preventif. Hal ini sebagaimana pernyataan dari informan D.

“Program Pemantauan Pertumbuhan Anak (PUS): Kami secara rutin melakukan pemantauan tinggi badan dan berat badan anak balita. Data yang diperoleh digunakan untuk mendeteksi dini masalah stunting, sehingga bisa ditanggulangi dengan cepat.”

(1 Februari 2025)

“Kami menyelenggarakan kelas untuk para ibu hamil dan menyusui, di mana kami memberikan informasi tentang gizi seimbang, pentingnya makanan bergizi, dan cara merawat anak dengan baik. Ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang nutrisi yang diperlukan untuk mencegah stunting.”

(1 Februari 2025)

Bahkan pihak Puskesmas Sudiang Raya secara khusus dan Puskesmas keseluruhan Kota Makassar secara umum memiliki Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) dalam pengentasan stunting.

V. DPRD Kota Makassar Kota Makassar

Upaya penanggulangan stunting memerlukan keterlibatan berbagai pihak, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kota Makassar) di Kota Makassar memiliki peran yang penting dalam penanganan pengentasan stunting. Dengan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyampaian aspirasi masyarakat, DPRD Kota Makassar berkontribusi secara aktif dalam memastikan bahwa kebijakan dan program yang berkaitan dengan kesehatan anak, khususnya stunting, dapat berjalan dengan baik.

DPRD Kota Makassar bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengesahkan peraturan daerah yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Kebijakan-kebijakan tersebut penting untuk menciptakan kerangka hukum yang mendukung upaya pemulihan stunting. DPRD Kota Makassar berperan dalam mengawasi implementasi kebijakan dan program-program yang ada, termasuk yang terkait dengan penanganan stunting. Mereka memastikan bahwa anggaran digunakan dengan efisien dan program-program berjalan sesuai dengan rencana.

DPRD Kota Makassar berperan sebagai fasilitator untuk menjalin kerjasama antara berbagai instansi pemerintah, swasta, dan organisasi non-pemerintah. Dengan memfasilitasi diskusi dan pertemuan, DPRD Kota Makassar dapat membantu menyatukan berbagai pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam menangani stunting secara terpadu. DPRD Kota Makassar dapat mengadvokasi peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dengan mendukung pembangunan infrastruktur kesehatan, seperti puskesmas dan posyandu, DPRD Kota Makassar membantu memastikan bahwa layanan kesehatan dan gizi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, terutama untuk masyarakat miskin kota. Hal ini sebagaimana pernyataan yang dipaparkan oleh informan E.

“DPRD Kota Makassar berperan penting sebagai pengawas kebijakan dan penganggaran di daerah, termasuk dalam isu stunting. Kami bertugas memastikan bahwa program-program terkait kesehatan, terutama yang berkaitan dengan penanganan stunting, mendapatkan perhatian dan dana yang cukup. Melalui fungsi legislasi kami, DPRD Kota Makassar juga berupaya untuk menyusun peraturan daerah yang mendukung program pencegahan stunting, serta mendorong kolaborasi antar instansi pemerintah.”

(23 Januari 2025)

Dalam penanganan pengentasan stunting, DPRD Kota Makassar Kota Makassar melakukan pengawasan pada setiap program-program pengentasan stunting yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar. Hal ini sebagaimana pernyataan yang dipaparkan oleh informan E.

"DPRD Kota Makassar terlibat dalam berbagai program, antara lain pengawasan terhadap pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan ibu dan anak. Kami juga berperan dalam menyusun anggaran untuk program-program yang mendukung penanganan stunting, seperti pemberian makanan tambahan dan penyuluhan gizi yang dikelola oleh Puskesmas. Selain itu, kami juga mengadakan forum-forum diskusi dengan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi mereka terkait isu-isu kesehatan dan pembangunan daerah, termasuk stunting."

(23 Januari 2025)

Pada pengentasan stunting, DPRD Kota Makassar Kota Makassar mengalami tantangannya. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi DPRD Kota Makassar adalah keterbatasan anggaran. Anggaran untuk program kesehatan sering kali bersaing dengan kebutuhan lainnya, seperti infrastruktur. Di masa efisiensi anggaran, ada kecenderungan untuk memprioritaskan belanja yang lebih darurat. Dan tantangan berikutnya adalah proses mengedukasi masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki pemahaman atau kesadaran mengenai stunting dan upaya pencegahannya. Masyarakat yang kurang memahami pentingnya gizi akan sulit untuk berpartisipasi dalam program-program yang ada. Hal ini sebagaimana pernyataan yang dipaparkan oleh informan E.

"Salah satu tantangan utama adalah perbedaan prioritas antar instansi. Setiap instansi memiliki fokus dan program yang berbeda, sehingga terkadang terjadi tumpang tindih atau kurangnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan anggaran juga menjadi kendala, di mana tidak semua program yang diusulkan dapat terakomodasi. Kami juga menghadapi masalah komunikasi yang sering kali menjadi penghambat dalam menjalin kerjasama yang efektif."

(23 Januari 2025)

Upaya untuk menghadapi tantangan tersebut, DPRD Kota Makassar kemudian membuat strategi-strategi yang digunakan untuk menyukseskan program pengentasan stunting. Strategi-strateginya antara lain: Pertama, membangun kemitraan yang lebih solid dan berkelanjutan dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dinas Sosial Kota Makassar, dan LSM. Forum koordinasi yang rutin dapat membantu menciptakan sinergi dalam program-program yang saling mendukung. Kedua, mengadakan kampanye penyuluhan dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi yang baik bagi anak dan dampak stunting. Ketiga, membentuk kebijakan yang didasarkan pada data dan bukti terbaru, agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Melibatkan akademisi dan peneliti dalam proses ini dapat memberikan wawasan yang berharga. Hal ini sebagaimana pernyataan yang dipaparkan oleh informan E.

"Kami berupaya untuk meningkatkan kolaborasi melalui pembentukan forum koordinasi yang melibatkan semua stakeholder terkait. Dalam forum tersebut, kami dapat saling berbagi informasi, mendiskusikan prioritas, serta merumuskan strategi bersama yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Selain itu, kami juga aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memahami pentingnya gizi dan peran semua pihak dalam menanggulangi masalah stunting. Dengan cara ini, kami berharap dapat membangun kepercayaan dan sinergi di antara instansi pemerintah."

(23 Januari 2025)

Pengentasan stunting menjadi salah satu prioritas penting dalam agenda pembangunan Indonesia, sejalan dengan komitmen untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam hal kesehatan dan kesejahteraan. Dalam konteks ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar memiliki peran yang krusial dalam merumuskan, mengawasi, dan mendukung implementasi program-program yang bertujuan untuk mengurangi angka stunting di Kota Makassar. Proyeksi DPR terhadap program pengentasan stunting mencakup berbagai aspek penting, mulai dari penguatan kebijakan dan regulasi, pengalokasian anggaran yang memadai, hingga pengawasan, kolaborasi, dan advokasi. Hal ini sebagaimana pernyataan yang dipaparkan oleh informan E.

"Harapan saya adalah agar penanganan stunting bisa menjadi perhatian utama bagi seluruh stakeholder di Kota Makassar. Kami ingin melihat kolaborasi yang lebih baik dan nyata antara DPRD Kota Makassar, pemerintah kota, masyarakat, dan sektor swasta dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting. Dengan komitmen bersama, kami percaya bahwa kita dapat menurunkan angka stunting dan memastikan masa depan yang lebih sehat bagi anak-anak di kota ini."

(23 Januari 2025)

DPRD Kota Makassar sebagai lembaga yang mengesahkan setiap produk undang-undang dalam bentuk Peraturan Daerah dalam perjalanannya mengentaskan stunting telah menerbitkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak. Ini kemudian menjadi dasar DPRD Kota Makassar dalam melakukan pengawasan terhadap setiap Peraturan Walikota yang terbit. Hal ini sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh informan E.

"Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak adalah langkah penting yang diambil oleh Pemerintah Kota Makassar untuk menjamin hak-hak anak di wilayah kami. Peraturan ini mencakup berbagai aspek perlindungan anak, termasuk kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari eksploitasi serta kekerasan."

(17 Januari 2025)

Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak tidak hanya menjadi landasan hukum tetapi juga menentukan peran dan tupoksi DPRD Kota Makassar dalam pengentasan stunting di Kota Makassar. Hal ini sebagaimana pernyataan informan E.

"DPRD Kota Makassar berperan penting dalam pengentasan stunting melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan dan program terkait kesehatan, terutama penanganan stunting, mendapatkan perhatian dan alokasi anggaran yang memadai."

(17 Januari 2025)

"Melalui proses pembahasan anggaran, kami memastikan bahwa program penanganan stunting diintegrasikan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dengan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kami berusaha mengalokasikan dana yang cukup untuk program-program yang fokus pada peningkatan gizi anak dan kesehatan masyarakat."

(17 Januari 2025)

Peran DPRD Kota Makassar sekaitannya sebagai lembaga legislatif berkisar pada mengadakan program kegiatan Rapat Dengar Pendapat, Sosialisasi, dan Seminar. Hal ini sebagaimana pernyataan dari informan E.

Salah satu program yang kami jalankan adalah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dari Dinas Kesehatan dan organisasi masyarakat, untuk membahas langkah-langkah konkret yang perlu diambil dalam penanganan stunting. Selain itu, kami juga menggelar seminar dan lokakarya yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pentingnya gizi baik bagi anak-anak.

(17 Januari 2025)

VI. Warga

Penanganan stunting tidak hanya tentang perbaikan gizi, tetapi juga tentang lingkungan, dan mengembangkan gaya hidup sehat sejak dini juga menjadi perhatian khusus, karena lingkungan yang tidak sehat, air yang tidak bersih, gaya hidup tidak sehat, dapat mengganggu gizi anak dan kesehatan. Peran masyarakat dalam bidang kesehatan adalah keadaan dimana individu, keluarga maupun masyarakat umum ikut serta bertanggung jawab terhadap kesehatan diri, keluarga ataupun kesehatan masyarakat lingkungannya. Meskipun masalah stunting sering kali dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah dan lembaga kesehatan, peran masyarakat sangat krusial dalam praktik penanganan stunting. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam mencegah stunting adalah kunci dalam upaya

mengatasi masalah kesehatan ini secara efektif. Tujuan masyarakat berpepran dalam pengentasan stunting adalah untuk: (1) meningkatkan peran dan kemandirian, dan kerjasama dengan lembaga-lembaga non pemerintah yang memiliki visi yang sesuai; (2) meningkatkan kuantitas jejaring kelembagaan dan organisasi non pemerintah dan masyarakat; serta (3) memperkuat peran aktif masyarakat dalam setiap tahap dan proses pembangunan melalui peningkatan jaringan kemitraan dengan masyarakat.

Meskipun masalah stunting sering kali dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah dan lembaga kesehatan, peran masyarakat sangat krusial dalam praktik penanganan stunting. Masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan edukasi dan kesadaran tentang gizi yang seimbang dan dampak stunting. Masyarakat dapat membantu menyebarluaskan informasi tentang pentingnya memberi makanan bergizi bagi anak-anak di 1.000 hari pertama kehidupan periode kritis untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kader kesehatan, anggota masyarakat, dan tokoh lokal dapat menjadi agen perubahan dengan memberikan penyuluhan mengenai pola makan sehat, pentingnya ASI eksklusif, dan pemanfaatan sumber daya makanan lokal yang bergizi. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh informan G

"Sebagai anggota masyarakat, saya melihat bahwa peran kami sangat penting dalam upaya pengentasan stunting, terutama melalui program posyandu. Posyandu memberikan kesempatan bagi kami, orang tua, untuk memantau pertumbuhan anak-anak dan mendapatkan informasi tentang gizi. Namun, saya merasa bahwa keterlibatan kami masih terbatas, terutama ketika organisasi non-pemerintah (NGO) dan instansi lain di luar Dinas Kesehatan Kota Makassar dan Puskesmas tidak berpartisipasi. Tanpa dukungan dari pihak lain, program ini terasa kurang maksimal."

(30 Januari 2025)

Tidak adanya peran dari instansi di luar Dinas Kesehatan Kota Makassar dan Puskesmas lebih dikarenakan dinas-dinas lain terlibat dalam bentuk yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Misalnya, peran Bappeda Kota Makassar yang merencanakan program-program dan anggarannya, peran Dinas Pendidikan yang memberikan edukasi pada saat berada di arena sekolah bukan dengan cara edukasi *door to door*. Tetapi menurut peneliti ketidakhadiran secara fisik dari instansi-instansi selain Dinas Kesehatan Kota Makassar dan Puskesmas sebenarnya dapat ditangani dengan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan perkembangan teknologi, masyarakat sekarang mampu memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi mengenai gizi dan kesehatan. Melalui platform digital, masyarakat dapat membagikan pengalaman mereka dalam mendidik anak, resep makanan sehat, atau praktis yang membantu dalam pemberian makanan bergizi. Menggunakan media sosial juga dapat membantu menjangkau lebih banyak orang dan meningkatkan kesadaran di level yang lebih luas tentang pentingnya pencegahan stunting. Kampanye online tentang gizi dan kesehatan anak yang disuarakan oleh masyarakat juga dapat memicu tindakan lebih lanjut dari pemerintah.

Masyarakat juga dapat berinovasi dalam memanfaatkan bahan-bahan makanan lokal dan meningkatkan nilai gizi makanan yang disajikan. Misalnya, petani lokal bisa berkolaborasi dengan komunitas untuk menciptakan kebun bersama yang menyediakan sayuran dan buah-buahan segar untuk keluarga. Inisiatif semacam ini tidak hanya meningkatkan akses terhadap makanan bergizi, tetapi juga mendukung pertanian lokal dan mengurangi kemiskinan. Banyak masyarakat yang belum memahami dampak stunting atau cara memberikan makanan yang bergizi kepada anak-anak mereka, yang mengakibatkan rendahnya partisipasi dalam program penanganan stunting. Beberapa tradisi dan kebiasaan yang ada di komunitas dapat menghambat perubahan pola makan atau sikap terhadap kesehatan dan gizi. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh informan G

"Saya sangat menghargai adanya program pengentasan stunting di sini, terutama yang dijalankan oleh Puskesmas. Program ini memberikan makanan bergizi untuk anak-anak, dan itu sangat membantu."

Namun, saya merasa bahwa program ini masih dangkal. Bantuan yang diberikan hanya berbentuk makanan tambahan, tanpa menyentuh masalah yang lebih mendasar, seperti perekonomian orang tua yang masih terpuruk."

(30 Januari 2025)

Pernyataan informan R menyiratkan bahwa hulu dari persoalan stunting di Kota Makassar terletak pada kondisi ekonomi orang tua yang berada dibawah garis kemiskinan. Dampak dari kondisi ekonomi yang berada dibawah garis kemiskinan membuat orang tua kesulitan mendapatkan akses pengetahuan dan pangan yang bergizi. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh informan G *"Karena, meskipun anak-anak mendapatkan makanan bergizi dari program ini, jika orang tua mereka tidak memiliki pekerjaan yang stabil atau pendapatan yang cukup, mereka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang baik secara berkelanjutan di rumah. Bantuan yang diberikan bersifat temporer dan tidak menyelesaikan masalah jangka panjang. Misalnya, mereka banyak yang kehilangan pekerjaan akibat kondisi ekonomi yang sulit ini, sehingga perekonomian mereka sangat berpengaruh terhadap kemampuan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak."*

(30 Januari 2025)

Lebih lanjut, informan R berpendapat bahwa program-program puskesmas yang bermanfaat, apabila tidak didukung dengan memberikan dukungan kepada orang tua dari anak yang menderita stunting hanya akan menjadi gerakan formalitas yang tidak menyentuh substansi masalahnya. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh informan G

"Puskesmas telah melakukan program yang bermanfaat, seperti pemeriksaan kesehatan rutin di posyandu dan penyuluhan tentang pentingnya gizi seimbang. Mereka sangat aktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Namun, saya berharap mereka juga bisa membantu lebih dari sekadar gambar di atas kertas dan makanan tambahan. Seharusnya ada inisiatif untuk mendukung orang tua dalam mengatasi masalah ekonomi mereka, seperti pelatihan keterampilan atau akses ke modal usaha."

(30 Januari 2025)

Pernyataan Informan G tersebut menyiratkan bahwa dibutuhkan untuk menyertakan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dan Dinas Koperasi & UMKM Kota Makassar dalam penanganan pengentasan stunting di Kota Makassar. Informan G pun memiliki harapan akan adanya ruang yang lebih bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif sehingga program-program menjadi lebih relevan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh informan G

"Masyarakat bisa berpartisipasi dengan aktif datang ke posyandu, mengikuti penyuluhan yang diadakan, dan berbagi informasi dengan tetangga tentang pentingnya gizi. Namun, kami juga berharap pihak Puskesmas dapat lebih mendengarkan kebutuhan kami dan melibatkan masyarakat dalam program-program yang lebih beragam, termasuk perekonomian. Jika ada penggalangan ide dari kami, mungkin bisa menghasilkan program yang lebih relevan."

(30 Januari 2025)

Pengetahuan terkait gizi seimbang, pentingnya makanan bergizi, dan cara merawat anak dengan baik sangat vital untuk mencegah terjadinya stunting. Namun, banyak warga yang tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang isu ini. Banyak dari mereka yang tidak menyadari bahwa makanan yang mereka berikan kepada anak mungkin tidak mencukupi kebutuhan gizi yang tepat. Misalnya, informasi tentang pentingnya konsumsi ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan, makanan pendamping ASI (MPASI) yang bergizi, dan pola makan sehat sering kali tidak sosialisasikan dengan baik. Tanpa pengetahuan ini, orang tua mungkin tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk memastikan anak-anak mereka tumbuh dengan baik dan sehat. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh informan G

"Sebagai bagian dari masyarakat, saya merasakan bahwa peran kami dalam program pengentasan stunting sangat penting, tetapi masih banyak yang perlu ditingkatkan. Salah satu masalah utama yang

kami hadapi adalah kurangnya akses pengetahuan tentang stunting. Banyak warga, termasuk saya sendiri, tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang apa itu stunting dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Tanpa pengetahuan yang cukup, sulit bagi kami untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah stunting."

(30 Januari 2025)

Salah satu tantangan terbesar dalam penanganan stunting adalah kurangnya kolaborasi antara berbagai instansi yang seharusnya terlibat. Sebagian besar program penanganan stunting sering kali dikelola secara terpusat oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar, Puskesmas, dan Posyandu. Meskipun mereka memiliki peran penting, pendekatan yang terfragmentasi ini menimbulkan banyak keterbatasan. Misalnya, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial Kota Makassar, dan organisasi non-pemerintah (NGO) yang juga memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pendidikan gizi dan program dukungan sosial sering kali tidak dilibatkan dalam program pengentasan stunting.

Tanpa kolaborasi yang baik, berbagai aspek yang sangat mempengaruhi stunting mungkin terabaikan. Misalnya, Dinas Pendidikan dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran gizi di sekolah, sementara Dinas Sosial Kota Makassar dapat memberikan dukungan bagi masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh informan G

"Sebagai anggota masyarakat, saya melihat bahwa peran kami sangat penting dalam upaya pengentasan stunting, terutama melalui program posyandu. Posyandu memberikan kesempatan bagi kami, orang tua, untuk memantau pertumbuhan anak-anak dan mendapatkan informasi tentang gizi. Namun, saya merasa bahwa keterlibatan kami masih terbatas, terutama ketika organisasi non-pemerintah (NGO) dan instansi lain di luar Dinas Kesehatan Kota Makassar dan Puskesmas tidak berpartisipasi. Tanpa dukungan dari pihak lain, program ini terasa kurang maksimal."

(30 Januari 2025)

Kurangnya kolaborasi tidak hanya terjadi dalam komunikasi antar instansi tetapi juga dalam bentuk pelibatan warga dalam pengambilan keputusan pada program-program pengentasan stunting di Kota Makassar. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh informan G

"Saya merasakan bahwa peran masyarakat dalam posyandu memang ada, tetapi terkadang kami merasa kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan mengenai program yang dijalankan. Kesehatan anak adalah tanggung jawab bersama, dan kami ingin didengar. Kami ingin bisa memberikan masukan dan memiliki suara dalam program-program yang terkait dengan kesehatan anak-anak kami."

(30 Januari 2025)

Untuk meningkatkan penanggulangan stunting, peran warga harus diperkuat dengan melibatkan mereka dalam program-program yang ada. Pendidikan dan penyuluhan menjadikan warga tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek yang aktif dalam proses penyelesaian masalah. Dengan melengkapi warga dengan pengetahuan yang tepat tentang gizi dan kesehatan, mereka akan lebih mampu mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah stunting.

"Keterlibatan organisasi masyarakat atau organisasi yang bukan pemerintah sama instansi lain sangat penting untuk menciptakan program yang lebih tepat sasaran. Kami sebagai masyarakat tentu perlu dukungan tambahan, seperti edukasi yang lebih beragam, program pangan bergizi yang bersinergi dengan akses ke pendidikan gizi, dan pelatihan bagi kader posyandu. Tanpa keterlibatan mereka, kami merasa banyak inisiatif yang bisa meningkatkan pemahaman dan akses kami terhadap gizi yang baik menjadi terabaikan."

(30 Januari 2025)

Kurang optimalnya hasil dari program-program penanganan pengentasan stunting tentu berdampak secara langsung pada pengetahuan dari orang tua dan anak mengenai stunting. Di banyak komunitas, ada pandangan yang masih keliru yang menganggap stunting bukanlah suatu penyakit. Banyak orang tua mungkin berpikir bahwa anak mereka yang terlihat sehat dan aktif meskipun

memiliki tinggi badan yang kurang, tidak perlu khawatir tentang gizi. Akibatnya, mereka mengabaikan pentingnya pemantauan pertumbuhan dan gizi anak, berpikir bahwa masalah stunting adalah kenormalan yang tidak perlu diatasi. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh informan G

"Tentu. Banyak ibu di komunitas kami tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang gizi yang baik dan pentingnya menjaga kesehatan anak sejak dini. Kami tidak tahu betapa krusialnya makanan bergizi dalam 1.000 hari pertama kehidupan anak. Selain itu, ada kesan bahwa stunting bukanlah masalah serius yang perlu diperhatikan. Banyak orang masih menganggap bahwa anak yang tampak sehat dan aktif tidak perlu khawatir tentang masalah gizi, sehingga mereka mengabaikan pentingnya pemantauan pertumbuhan dan konsumsi makanan yang bergizi."

(30 Januari 2025)

Pandangan ini sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan kelangsungan masalah stunting selama bertahun-tahun ke depan. Jika masyarakat tidak menyadari bahwa stunting memberikan dampak jangka panjang pada perkembangan fisik dan mental anak, mereka cenderung tidak akan proaktif dalam mencari solusi. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat tentang dampak stunting harus ditingkatkan melalui pendidikan dan penyuluhan yang efektif. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh informan G

"Kesadaran di lingkungan kami masih sangat rendah. Masih banyak orang yang tidak mengetahui bahwa stunting adalah suatu bentuk malnutrisi yang bisa memengaruhi masa depan anak-anak. Ketika kami berbicara tentang stunting, beberapa orang masih berpikir bahwa itu bukan penyakit, seakan hanya masalah yang sepele. Hal ini memengaruhi bagaimana kami mendekati masalah gizi dan kesehatan anak. Jika masyarakat kurang sadar, mereka tidak akan berusaha untuk mencari informasi atau bertanya tentang cara mencegahnya."

(30 Januari 2025)

VII. Kader Posyandu

Kader Posyandu memegang peran yang sangat strategis dalam pengentasan stunting di Indonesia, termasuk di Kota Makassar. Kader posyandu adalah relawan yang dilatih untuk memberikan layanan kesehatan dasar kepada masyarakat, terutama ibu dan anak. Mereka merupakan orang pertama yang melakukan pengukuran pertumbuhan anak dan memberikan informasi tentang kesehatan dan gizi, sehingga dapat mendeteksi masalah stunting secara dini. Kader posyandu umumnya beroperasi di tingkat komunitas dan memiliki ikatan emosional yang kuat dengan warga sekitar. Hal ini memudahkan mereka untuk menjangkau keluarga-keluarga yang membutuhkan informasi dan pelayanan, serta membangun kepercayaan dengan masyarakat. Dengan aksesibilitas yang baik, kader dapat melakukan pengamatan rutin terhadap perkembangan anak.

Melalui kegiatan rutin di posyandu, kader dapat memonitor pertumbuhan anak secara konsisten. Data yang terkumpul digunakan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah gizi, serta menilai efektivitas program intervensi. Dengan pemantauan yang sistematis, tindakan cepat dapat diambil jika ditemukan adanya anak-anak yang mengalami stunting. Dengan posisi, pengetahuan, dan keterampilan yang mereka miliki, kader posyandu adalah ujung tombak dalam pengentasan stunting. Upaya mereka dalam mengedukasi masyarakat, memantau pertumbuhan, dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak sangat penting untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat dan gizi yang lebih baik bagi anak-anak.

Secara regulasi, Posyandu dalam perjalanannya mengentaskan stunting mengacu pada Peraturan Walikota Makassar Nomor 96 Tahun 2023 tentang Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting. Peraturan ini memberikan kepastian hukum dan menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Posyandu, dalam melaksanakan program penurunan stunting secara terintegrasi. Hal ini sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh informan I.

“Posyandu memiliki posisi yang sangat strategis dalam implementasi Peraturan Walikota tersebut. Sebagai garda terdepan, kami bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan kesehatan dan gizi anak-anak serta ibu hamil di wilayah kami.”

(1 Februari 2025)

“Peraturan ini sangat memberikan dorongan bagi kami sebagai kader posyandu. Dengan adanya perhatian yang lebih besar dari pemerintah, kami dapat mengakses lebih banyak sumber daya dan pelatihan, yang akhirnya meningkatkan efektivitas program kami. Kami melihat peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi yang baik, dan harapannya, angka stunting di Kota Makassar bisa menurun.”

(1 Februari 2025)

Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak tidak hanya menjadi landasan hukum tetapi juga menentukan peran dan tupoksi DPRD Kota Makassar dalam pengentasan stunting di Kota Makassar. Hal ini sebagaimana pernyataan informan I.

“Kader posyandu berperan sebagai garda terdepan dalam upaya penanganan stunting. Kami memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemantauan pertumbuhan anak, memberikan edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya gizi seimbang, dan melakukan penyuluhan kesehatan”

(1 Februari 2025)

Peran DPRD Kota Makassar sekaitannya sebagai lembaga legislatif berkisar pada mengadakan program kegiatan Rapat Dengar Pendapat, Sosialisasi, dan Seminar. Hal ini sebagaimana pernyataan dari informan I.

“Pemantauan Pertumbuhan dan Pemberian Nutrisi : Kami secara rutin melakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan anak. Data ini akan dipergunakan untuk memantau pertumbuhan anak dan mendeteksi dini adanya masalah gizi, termasuk stunting.”

(1 Februari 2025)

Kader posyandu bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk memastikan anak-anak mendapatkan vaksinasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Imunisasi penting untuk mencegah penyakit yang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak.

(1 Februari 2025)

Tabel 2.9 Stakeholder yang Terlibat dalam Penanganan Stunting di Kota Makassar

No	Stakeholder	Landasan Hukum	Peran	Program Kegiatan
1	Dinas Kesehatan Kota Makassar	Peraturan Walikota Makassar Nomor 96 Tahun 2023 tentang Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting	<ul style="list-style-type: none"> ● Mengumpulkan dan menganalisis data terkait status gizi dan pertumbuhan anak di Kota Makassar, termasuk prevalensi stunting. ● Melakukan survei dan penelitian untuk 	<ul style="list-style-type: none"> ● Sosialisasi Pencegahan Stunting ● Pemantauan Pertumbuhan Anak ● Pelatihan Pemberian Makanan Bayi dan Anak ● Grebek Stunting

			<p>memahami faktor-faktor penyebab stunting di Kota Makassar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana strategis untuk penanganan stunting berdasarkan data yang diperoleh. 	
2	Dinas Sosial Kota Makassar	Peraturan Walikota Makassar Nomor 96 Tahun 2023 tentang Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. • Keluarga yang lebih sejahtera cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap gizi dan kesehatan. • Melakukan pemantauan terhadap kondisi keluarga yang berada dalam kategori berisiko stunting. • Pengumpulan Data dan evaluasi kondisi sosial-ekonomi keluarga sangat penting untuk merancang intervensi yang tepat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi Sosial • Perlindungan dan Jaminan Sosial. • Program Bapak Asuh Stunting
3	Bappeda Kota Makassar	Peraturan Walikota Makassar Nomor 96	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda bertanggung jawab merumuskan rencana strategis 	<ul style="list-style-type: none"> • Diseminasi Penyusunan Data Stunting Berbasis

		Tahun 2023 tentang Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting	<p>dan program kerja yang berkaitan dengan penanganan stunting di Kota Makassar, berdasarkan data dan analisis situasi terkini.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengalokasikan anggaran untuk program-program intervensi yang berkaitan dengan pengendalian stunting, termasuk program gizi, kesehatan, dan pendidikan. • Bappeda bertugas untuk mengumpulkan data terkait prevalensi stunting dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, termasuk status gizi masyarakat, akses layanan kesehatan, dan aspek sosial ekonomi. 	<p>Aplikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Koordinasi Pelaksanaan Konvergensi Aksi Rembuk Stunting • Evaluasi Kinerja Penurunan Stunting • Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting.
4	Puskesmas	Peraturan Walikota Makassar Nomor 96 Tahun 2023 tentang Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan orang tua mengenai pentingnya gizi yang baik untuk tumbuh kembang anak, termasuk mengedukasi tentang pola makan seimbang serta makanan bergizi yang dapat mencegah stunting. • Melakukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemantauan Pertumbuhan Anak • Program pemberian makanan tambahan (PMT)

			<p>pengukuran tinggi badan dan berat badan anak secara rutin untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak usia di bawah lima tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melatih kader Kesehatan di tingkat masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang stunting, gizi, dan kesehatan. 	
5	DPRD Kota Makassar Komisi D	Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • DPRD berwenang untuk merumuskan dan mengesahkan Perda yang mendukung upaya penanggulangan stunting, seperti peraturan terkait gizi, kesehatan masyarakat, dan perlindungan anak. • DPRD dapat menciptakan kebijakan yang mengalokasikan dan mengatur anggaran untuk program-program penanganan stunting, termasuk pendidikan gizi dan layanan kesehatan. • DPRD memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan program-program pemerintah yang berkaitan dengan penanganan 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Dengar Pendapat • Sosialisasi • Seminar

			stunting. Ini mencakup memonitor efektivitas intervensi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan lembaga terkait lainnya.	
6	DPPKB	Peraturan Walikota Makassar Nomor 96 Tahun 2023 tentang Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting	<ul style="list-style-type: none"> • DPPKB menyediakan program penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya gizi yang baik, kesehatan reproduksi, dan perencanaan keluarga yang memadai untuk mendukung pertumbuhan anak. • DPPKB melatih kader kesehatan di tingkat komunitas untuk menyampaikan informasi tentang pencegahan stunting dan pemenuhan gizi yang baik kepada keluarga. • Melalui program keluarga berencana, DPPKB mendorong keluarga untuk merencanakan jumlah anak agar mereka dapat memberikan perhatian dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyuluhan Gizi • Program Bapak Asuh Stunting • Pelayanan Keluarga Berencana • Program DASHAT: Merupakan inisiatif pemberian makanan tambahan bergizi kepada anak-anak yang mengalami stunting. • Program LOPIS (Lorong Pengendali Stunting): Diluncurkan pada tahun 2022, program ini bertujuan untuk melakukan intervensi pencegahan dan penanganan stunting yang terintegrasi di 33 lokasi fokus (lokus) di Kota Makassar • Genting (Gerakan Orang Tua Cegah Stunting) • Tim Percepatan Penurunan

			sumber daya yang cukup untuk kebutuhan gizi anak, sehingga mengurangi risiko stunting.	Stunting
7	Warga	-	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian Asupan Gizi Seimbang: Ibu bertanggung jawab memastikan anak menerima makanan bergizi seimbang yang mendukung pertumbuhan optimal. • Mengikuti Program Kesehatan Anak: Ibu diharapkan aktif membawa anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya untuk mendapatkan imunisasi lengkap, vitamin A, dan pemantauan pertumbuhan secara rutin 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian Asupan Gizi Seimbang • Mengikuti Program Kesehatan Anak
8	Posyandu	Peraturan Walikota Makassar Nomor 96 Tahun 2023 tentang Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting.	<ul style="list-style-type: none"> • Kader Posyandu memberikan penyuluhan kepada orang tua mengenai pentingnya gizi seimbang, pola makan yang sehat, dan cara memberikan makanan bergizi kepada anak. • Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi stunting 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemantauan Pertumbuhan Anak • Program pemberian makanan tambahan (PMT)

Setelah diketahui stakeholder-stakeholder yang berperan dalam penanganan pengentasan stunting di Kota Makassar dengan menggunakan pendekatan pentahelix, peneliti kemudian melakukan

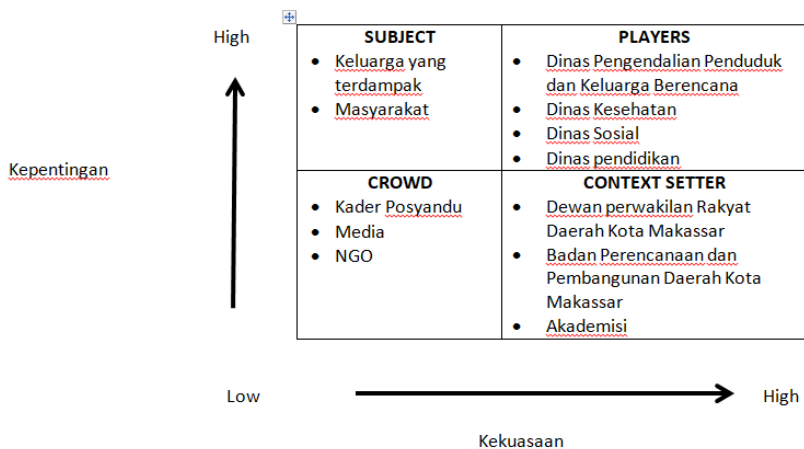
pemetaan stakeholder menggunakan teori *Power & Interest Grid* oleh Eden & Ackermann. Teori *Power and Interest Grid* yang dikembangkan oleh Eden & Ackermann merupakan alat analitis yang sangat penting dalam manajemen proyek dan keterlibatan stakeholder. Teori ini mengklasifikasikan stakeholders berdasarkan dua dimensi utama: kekuasaan dan kepentingan mereka terhadap sebuah proyek. Pentingnya teori ini terletak pada kemampuannya untuk membantu organisasi memahami dinamika hubungan dengan berbagai pihak yang terlibat, serta mendesain strategi keterlibatan yang tepat.

Salah satu nilai utama dari *Power and Interest Grid* adalah kemampuannya untuk memfasilitasi identifikasi stakeholder yang mungkin berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan proyek. Dengan memetakan siapa yang memiliki kekuasaan tinggi dan kepentingan tinggi, organisasi dapat menentukan siapa yang perlu dilibatkan secara aktif, menjaga komunikasi, atau bahkan hanya diinformasikan. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien.

Selain itu, teori ini juga memainkan peran penting dalam mencegah konflik dan risiko dengan mendorong komunikasi yang lebih terbuka antara stakeholder. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi setiap pihak, organisasi bisa lebih proaktif dalam merespons kekhawatiran dan prioritas mereka. Ini tidak hanya memperkuat hubungan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan kepercayaan.

Di era kolaborasi yang semakin kompleks ini, pentingnya teori Power and Interest Grid semakin meningkat. Dengan membantu organisasi merancang strategi yang lebih terfokus dan terarah, teori ini mendukung keberhasilan proyek secara keseluruhan, menjamin bahwa setiap pihak yang terlibat merasa dihargai dan mendapatkan suara dalam proses pengambilan keputusan.

Gambar 2.6 Power & Interest Grid Pemetaan Stakeholder Penanganan Pengentasan Stunting di Kota Makassar



Berdasarkan gambar 2.6, Pemetaan stakeholder menggunakan teori *Power & Interest Grid* mengelompokkan pemangku kepentingan ke dalam empat kategori:

- **Players (Kekuatan Tinggi – Kepentingan Tinggi)**

Dalam konteks teori *Power and Interest Grid* oleh Eden & Ackermann, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan dapat diposisikan sebagai pemain kunci dalam pengentasan stunting dimana memiliki kekuasaan tinggi dan kepentingan tinggi terhadap isu stunting. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk

pelayanan kesehatan, mereka berperan dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program-program kesehatan.

Dinas Kesehatan Kota Makassar memiliki data, sumber daya, dan kemampuan untuk melakukan intervensi langsung, sehingga mereka perlu dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap program.

Dinas Sosial Kota Makassar berfungsi untuk mendukung masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk gizi dan kesehatan anak. Dinas ini terlibat dalam program-program bantuan sosial untuk keluarga miskin yang memiliki anak berisiko stunting. Dari perspektif teori Power and Interest Grid, posisi Dinas Sosial Kota Makassar bisa dianggap memiliki kekuasaan moderat tetapi kepentingan tinggi. Dinas ini penting dalam menyediakan dukungan finansial dan sosial bagi keluarga yang mengalami kesulitan, membantu mereka mendapatkan akses ke makanan bergizi. Dengan melakukan intervensi sosial, Dinas Sosial Kota Makassar berperan dalam menurunkan angka kemiskinan yang menjadi penyebab utama stunting.

Dinas Pendidikan juga memiliki peran penting sebagai context setter. Pendidikan yang baik meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu kesehatan dan gizi. Dinas Pendidikan memiliki kekuasaan moderat hingga tinggi dan kepentingan tinggi dalam konteks stunting, karena mereka bertanggung jawab untuk membentuk generasi masa depan. Melalui program pendidikan kesehatan di sekolah, mereka bisa mengajarkan anak-anak dan keluarga tentang pentingnya gizi seimbang, pengelolaan makanan, dan pola hidup sehat. Dengan mempromosikan pengetahuan kesehatan dan gizi di kalangan siswa, Dinas Pendidikan membantu memastikan bahwa anak-anak memahami pentingnya pencegahan stunting bahkan sebelum mereka menjadi orang tua.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB Kota Makassar) memiliki posisi strategis sebagai Players dengan kekuasaan tinggi dan kepentingan tinggi, menjadi ketua pelaksana dalam program penurunan stunting Nasional, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana melalui DPPKB Kota Makassar bertugas untuk menangani isu-isu terkait pengendalian jumlah penduduk dan kesehatan reproduksi. Program-program yang dikelola oleh DPPKB Kota Makassar berfokus pada edukasi tentang perencanaan keluarga dan kesehatan ibu, sehingga secara langsung terkait dengan pencegahan stunting.

Dengan memberdayakan perempuan dan keluarga untuk merencanakan waktu dan jumlah kelahiran, DPPKB Kota Makassar berkontribusi untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perhatian lebih dalam hal gizi dan perawatan kesehatan yang dibutuhkan, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupannya.

Ketiga dinas ini — Dinas Sosial Kota Makassar, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana — perlu berkolaborasi dengan baik untuk mengurangi stunting secara efektif. Posisi mereka sebagai context setters memungkinkan mereka untuk menciptakan kebijakan dan praktik yang saling mendukung di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Misalnya, Dinas Pendidikan bisa bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar untuk mengintegrasikan pendidikan gizi ke dalam kurikulum. Sementara itu, Dinas Sosial Kota Makassar bisa berkolaborasi dengan DPPKB Kota Makassar dalam memberikan dukungan kepada keluarga-keluarga di wilayah kurang mampu. Dengan sinergi yang baik, kebijakan yang dihasilkan bisa lebih holistik dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Penempatan ketiga instansi ini dalam *Players* dikarenakan walaupun ketiga instansi ini memiliki kekuasaan yang besar dalam penanganan stunting tetapi berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti kemudian melihat bahwa ketiga instansi ini bersikap pasif dikarenakan adanya persepsi bahwa stunting adalah isu kesehatan sehingga menjadi domain Dinas Kesehatan Kota Makassar.

- **Context Setter (Kekuatan Tinggi – Kepentingan Rendah)**

Pada konteks teori *Power and Interest Grid* karya Eden & Ackermann, • Dinas Pendidikan, DPRD Kota Makassar, Bapenda Kota Makassar, dan Akademisi memainkan peran sebagai *context setters* dalam upaya pengentasan stunting. Sebagai *context setters*, lembaga-lembaga ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk lingkungan yang relevan bagi proses perencanaan dan pelaksanaan program-program terkait gizi dan kesehatan masyarakat.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Kota Makassar) berfungsi sebagai pemain kunci dalam konteks perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah, termasuk program penanggulangan stunting. Dengan kekuasaan tinggi dan kepentingan tinggi, Bappeda Kota Makassar berperan dalam merumuskan kebijakan dan anggaran, serta mengkoordinasikan berbagai instansi pemerintah. Posisi mereka sangat strategis karena Bappeda Kota Makassar dapat memastikan bahwa isu stunting menjadi bagian integral dari rencana pembangunan daerah. Dengan data yang akurat dan analisis yang mendalam, Bappeda Kota Makassar dapat mendorong kolaborasi lintas sektor untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam pengentasan stunting di masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar juga memiliki kekuasaan tinggi, tetapi kepentingan mereka lebih variatif. Mereka bertugas membuat kebijakan dan mengalokasikan anggaran untuk program kesehatan. Meskipun DPRD Kota Makassar tidak langsung terlibat dalam layanan kesehatan, kepentingan mereka akan kinerja dan dukungan terhadap kesehatan masyarakat menjadikan mereka sangat relevan. Posisinya sebagai pengawas dan penentu kebijakan memungkinkan DPRD Kota Makassar untuk mempengaruhi kondisi yang mendukung keberhasilan program penanggulangan stunting.

Sementara itu, Akademisi memiliki kekuatan intelektual dan pengaruh kebijakan karena hasil penelitian dan rekomendasi ilmiahnya sering dijadikan rujukan oleh pemerintah, LSM, dan organisasi internasional. Mereka juga terlibat dalam penyusunan pedoman teknis, indikator gizi, hingga desain intervensi berbasis bukti (*evidence-based*), meskipun akademisi memiliki peran penting, tidak semua dari mereka terlibat langsung dalam implementasi program stunting di lapangan, fokus mereka lebih pada penelitian, pendidikan, atau pengembangan teori, bukan pada pelaksanaan program secara langsung.

- **Subject (Kekuatan Rendah – Kepentingan Tinggi)**

Pada teori *Power and Interest Grid* oleh Eden & Ackermann, Keluarga yang terdampak stunting dan warga masyarakat memainkan peran sebagai *subject* dalam konteks penanganan stunting dikarenakan keluarga yang terdampak stunting mereka langsung mengalami dampak stunting dan sangat berkepentingan dengan solusi yang diberikan untuk itu mereka harus terus dilibatkan, diberikan edukasi, informasi, dan dukungan secara aktif, meskipun mereka tidak memegang kendali atas program.

Sementara itu, warga berfungsi sebagai *subject* yang memiliki kepentingan tinggi namun dengan kekuasaan yang sangat bervariasi. Sebagai penerima layanan, mereka harus memahami betapa pentingnya gizi dan pertumbuhan anak dalam pencegahan stunting. Namun, akses pengetahuan yang terbatas membuat banyak warga tidak sepenuhnya menyadari dampak negatif dari stunting dan pentingnya gizi yang baik. Warga, dengan keterlibatannya dalam program-program kesehatan, dapat memberikan masukan, mengadvokasi kebijakan, dan mengambil tindakan di tingkat lokal untuk memperbaiki kondisi gizi anak. Dengan kolaborasi yang baik antara Puskesmas dan warga, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, program-program penanganan stunting dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih besar bagi kesehatan anak.

Penempatan keluarga yang terdampak dan warga masyarakat sebagai *subject* dikarenakan mereka adalah aktor yang terdampak secara langsung. Meskipun keluarga terdampak dan masyarakat umum tidak memiliki kekuatan tinggi dalam membuat kebijakan namun mereka adalah subjek penting dalam penanganan stunting karena mereka menjadi sasaran langsung dari intervensi dan berperan aktif dalam keberhasilan program.

- **Crowd (Kekuatan Rendah – Kepentingan Rendah)**

Pada kerangka teori *Power and Interest Grid* yang dikembangkan oleh Eden & Ackermann, media, dan organisasi non-pemerintah (NGO) dapat diposisikan sebagai *crowd* dalam konteks penanganan pengentasan stunting. Pemosisian ini menunjukkan bahwa meskipun ketiga kelompok ini memiliki potensi untuk berkontribusi dalam penanganan stunting, mereka tidak dilibatkan secara aktif dalam proses tersebut, sehingga pengaruh dan kontribusi mereka terasa minimal.

Media berperan penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan mempengaruhi opini publik. Sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, media dapat memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesadaran tentang stunting dan pentingnya gizi bagi kesehatan anak. Melalui pemberitaan, kampanye edukasi, dan berbagai program siaran, media berpotensi membantu masyarakat memahami isu stunting dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam program-program pencegahan.

Sayangnya, media sering kali tidak dilibatkan dalam proses komunikasi program pengentasan stunting yang dijalankan oleh pemerintah. Kurangnya akses informasi yang jelas dan terkini mengenai inisiatif pemerintah menjadikan media tidak mampu menyajikan konten yang relevan dan mendidik. Ketidajelasan dalam informasi menyebabkan masyarakat tetap tidak memahami pentingnya isu stunting dan peran mereka dalam pencegahannya. Dengan demikian, media terjebak dalam posisi sebagai *crowd* yang dapat memberikan dampak besar jika mereka terlibat, tetapi tidak dimanfaatkan secara optimal.

NGO memiliki peran penting dalam organisasi sosial dan kesehatan, dengan jaringan yang luas dan kemampuan untuk menjangkau masyarakat secara langsung. Mereka seringkali memiliki program-program yang bisa mendukung upaya pengentasan stunting, termasuk penyuluhan gizi, pengembangan pola makan, dan dukungan bagi keluarga yang menghadapi risiko stunting. NGO juga berperan dalam mengadvokasi kebijakan yang lebih baik dan memberikan suara bagi masyarakat yang terdampak. Namun, meskipun NGO memiliki kapasitas dan pengalaman yang berharga, mereka sering tidak dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pemerintah terkait penanganan stunting. Ketidakpastian dalam kolaborasi, kurangnya pengakuan atas peran mereka, serta adanya tumpang tindih dalam program dapat mengakibatkan kebingungan dan mengurangi efektivitas intervensi yang bisa dilakukan. NGO menjadi *crowd* yang berpotensi besar untuk mendukung pengentasan stunting, tetapi keberadaan mereka kurang terasa dalam strategi yang diterapkan oleh pemerintah.

Media dan NGO memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam penanganan stunting, namun mereka ditempatkan sebagai *crowd* dalam teori *Power and Interest Grid* karena tidak dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya pengaruh dan kontribusi mereka dalam upaya mengatasi masalah stunting. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengkonsolidasikan peran mereka dalam proses ini. Dengan melibatkan akademisi dalam penelitian dan perumusan kebijakan, memanfaatkan media sebagai alat komunikasi dan edukasi, serta memberikan ruang bagi NGO untuk berpartisipasi dalam implementasi program, kita dapat menciptakan kolaborasi yang lebih efektif dan bermanfaat dalam penanganan stunting. Sinergi antara semua pemangku kepentingan—termasuk pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan NGO—adalah kunci dalam mengatasi masalah stunting yang kompleks dan berkelanjutan, demi generasi yang lebih sehat ke depan.

Tabel 2.10 Matriks Kekuatan dan Kepentingan

STAKE HOLDER	KEKUATAN (POWER)	KEPENTINGAN (INTEREST)	POSISI DALAM MATRIX
Dinas PPKB, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas	Tinggi	Tinggi	Key Player (Pemain Kunci)

Pendidikan			
Keluarga yang terdampak, dan Masyarakat	Rendah	Tinggi	Keep Informed (Terus diberikan Informasi)
Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Makassar, Badan Perencana dan Pembangunan Daerah, Akademisi	Tinggi	Rendah	Keep Satisfied (Tetap Puas)
Kader Posyandu, Media, NGO	Rendah	Rendah	Minimal Effort (Upaya Minimal)

Penjelasan Matriks:

- **Dinas PPKB, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan (Tinggi Kekuatan, Tinggi Kepentingan – Key Player)**

Memiliki pengaruh besar dalam kebijakan atau sumber daya yang dapat digunakan untuk menangani stunting dan memiliki kepentingan tinggi dalam keberhasilan program stunting. Misalnya sebagai pemimpin proyek atau pejabat yang bertanggung jawab langsung. Sehingga mereka Harus terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.

- **Keluarga yang terdampak, dan Masyarakat (Rendah Kekuatan, Tinggi Kepentingan – Keep Informed)**

Memiliki kepentingan tinggi dalam program ini, misalnya sebagai subjek sasaran program stunting para keluarga yang terdampak stunting memiliki harapan agar anak-anak mereka bebas dari stunting, harapan akan derajat kesehatan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Namun, pengaruhnya dalam pengambilan keputusan atau akses terhadap sumber daya relatif kecil. Sehingga perlu diberi informasi secara berkala dan diajak berkolaborasi agar tetap mendukung program.

- **Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Makassar, Badan Perencana dan Pembangunan Daerah, Akademisi (Tinggi Kekuatan, Rendah Kepentingan – Keep Satisfied)**

Memiliki pengaruh besar karena dapat menyediakan bantuan sosial, anggaran, dan kebijakan terkait stunting. Namun, kepentingannya dalam isu ini mungkin tidak sebesar sektor kesehatan atau pemerintah daerah yang langsung menangani stunting. Harus dijaga kepuasannya agar tetap mendukung program, dan senantiasa menjalin hubungan yang baik dalam setiap program kolaborasi kedepannya.

- **Kader Posyandu, Media, NGO (Rendah Kekuatan, Rendah Kepentingan – Minimal Effort)**

Pengaruh mereka terhadap kebijakan dan sumber daya terbatas. Kepentingannya juga tidak setinggi pihak yang bertanggung jawab langsung dalam program stunting. Cukup dimonitor dan dijaga komunikasi secukupnya, tetapi tidak perlu banyak investasi dalam interaksi.

2.5 Temuan Penelitian

Berdasarkan olah data penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis kemudian menemukan beberapa temuan pada penelitian ini, sebagai berikut:

- Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dimana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana selaku ketua pelaksana bertanggungjawab terhadap pelaksanaan percepatan penurunan stunting secara nasional. Hal ini menyebabkan dualisme kepemimpinan penanganan stunting yang di lakukan sebelumnya oleh Kementerian Kesehatan sehingga terjadi indikasi inefisiensi dan inefektifitas pada pelaksanaan

program dilapangan.

- Masih ada beberapa program tumpang tindih antara stakeholder seperti program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan program Pemantauan Pertumbuhan Anak yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar, DPPKB Kota Makassar dan kelurahan. Tumpang tindih program pada stakeholder yang terlibat dalam pengentasan stunting memiliki dampak negatif. Tumpang tindih program biasanya terjadi ketika beberapa program yang sama dari berbagai instansi atau organisasi berfokus pada tujuan yang sama, tetapi dengan pendekatan, strategi, atau sumber daya yang tidak terkoordinasi. Ketika beberapa program berjalan secara paralel tanpa koordinasi, sumber daya finansial dapat terbuang. Misalnya, dua program yang sama mungkin membeli bahan makanan bergizi yang sama untuk disalurkan kepada masyarakat tanpa menyadari bahwa program lain juga melakukannya. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program dapat terpakai secara berlebihan untuk tugas-tugas yang mirip atau saling terkait tanpa memberikan nilai tambah yang signifikan.
- Adanya ketidaksinkronan data pada stakeholder yang berperan dalam pengentasan stunting. Misalnya data di Dinas Kesehatan Kota Makassar yang memperlihatkan adanya trend penurunan angka stunting dari rentang 2021-2014 dengan data dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi stunting di Kota Makassar meningkat dari 18,04% pada tahun 2023 menjadi 25,6% di Juni 2024. perbedaan data dapat menyebabkan kebingungan di antara dinas yang berbeda, menghambat kerjasama dan kolaborasi. Ketika seorang pemangku kepentingan tidak memiliki pemahaman yang sama mengenai masalah yang ada, sulit untuk merencanakan intervensi yang terintegrasi. Selain itu, perbedaan data dapat mengarah pada kebijakan yang tidak akurat. Jika satu dinas menggunakan data yang menunjukkan prevalensi stunting yang lebih tinggi dibandingkan dengan dinas lain, kebijakan yang diambil mungkin tidak tepat sasaran atau kurang relevan dengan realitas di lapangan.
- Kurangnya pelibatan media sebagai stakeholder membuat informasi mengenai penanganan stunting menjadi tidak tersalurkan dengan baik. Media berfungsi sebagai saluran informasi yang penting. Dengan kurangnya keterlibatan media, masyarakatpun menjadi kurang teredukasi dengan isu stunting, termasuk penyebab, dampak, dan cara pencegahannya. Hal ini dapat mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pola pengasuhan anak yang baik dan benar.
- Masih minimnya pelibatan akademisi dalam program-program yang dicanangkan tidak menyentuh masyarakat. Akademisi biasanya terlibat dalam riset yang memberikan wawasan dan solusi berbasis bukti dalam penanganan stunting. Tanpa kontribusi mereka, program edukasi mungkin tidak didasarkan pada data yang solid dan penelitian, sehingga kurang efektif dalam mendidik masyarakat.

Tabel 2.11 Tabel Temuan Hasil Penelitian

No	Temuan
1	Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dimana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana selaku ketua pelaksana bertanggungjawab terhadap pelaksanaan percepatan penurunan stunting secara nasional.
2	Program tumpang tindih antara stakeholder
3	Adanya ketidaksinkronan data pada stakeholder yang berperan dalam pengentasan stunting

4	Kurangnya pelibatan media dan akademis
---	----------------------------------------

2.6 Kesimpulan

Penelitian ini telah menyajikan pemetaan stakeholder yang berperan dalam proses penanganan stunting di Kota Makassar. Hasil-hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa penanganan stunting tidak hanya menjadi domain Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Kota Makassar, Dinas Pendidikan Kota Makassar semata tetapi juga menjadi domain integratif dari berbagai pihak stakeholder.

Berdasarkan teori *Power and Interest Grid* oleh Eden & Ackermann. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemangku kepentingan dalam program pemulihan stunting sangat beragam dan memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas intervensi yang dilakukan.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Kota Makassar, Dinas Pendidikan Kota Makassar Sebagai pemain kunci (*Player*) yang memiliki kekuatan yang sangat tinggi dalam pengambilan keputusan terkait intervensi kesehatan dan penyaluran sumber daya untuk program pemulihan stunting. Keberadaan dan peran aktif mereka sebagai otoritas yang mengelola program kesehatan publik menjadi sentral dalam upaya penanganan masalah gizi anak di kota ini. juga termasuk dalam kategori pemangku kepentingan yang memiliki kekuatan tinggi dan ketertarikan besar terhadap isu stunting. Mereka adalah aktor utama yang memiliki kekuasaan besar dalam merancang dan melaksanakan kebijakan, dan mereka juga sangat peduli terhadap isu stunting.

Tindakan yang Direkomendasikan sebaiknya harus dikelola dengan dekat (*manage closely*), pelibatan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan pastikan alokasi anggaran dan program lintas sektor selaras. Di sisi lain, *context setter* dalam penelitian ini mencakup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kota Makassar), Bappeda Kota Makassar dan Akademisi berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memperkuat program pemulihan stunting melalui Keterlibatan mereka dalam mendukung kebijakan, alokasi anggaran, dan program-program yang mendukung pemulihan stunting di tingkat legislatif dan perencanaan daerah Meskipun memiliki kepentingan yang rendah, Mereka tetap berpengaruh dalam menetapkan konteks di mana kebijakan kesehatan diterapkan.

Demikian pula dengan Akademisi, mereka punya pengaruh besar, tapi keterlibatannya mungkin belum maksimal. Maka, peran ideal akademisi seharusnya ditingkatkan melalui masukan berbasis data kepada pemerintah daerah agar kebijakan lebih tepat sasaran.

Subject dari analisis adalah warga dan keluarga yang terdampak, yang berfungsi sebagai pelaksanaan program pemulihan stunting. Mereka sangat peduli dengan isu stunting (karena terdampak langsung), tapi tidak punya kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Tindakan yang direkomendasikan meliputi Berikan informasi dan edukasi secara terus-menerus, Libatkan mereka dalam kegiatan posyandu, edukasi gizi, pemantauan balita, Perkuat peran sebagai penerima manfaat aktif.

Terakhir, *crowd* terdiri dari kader posyandu, media, dan organisasi non-pemerintah, yang meskipun mereka memiliki pengaruh terbatas dan tingkat kepentingan yang rendah terhadap stunting secara langsung mereka memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran, penyuluhan masyarakat, serta advokasi isu-isu stunting. Melalui dokumentasi, dan penyebaran informasi, mereka dapat membantu mempengaruhi kebijakan dan program dengan cara yang konstruktif. tindakan yang direkomendasikan melalui monitor secara rutin, dorong partisipasi melalui pelatihan, kampanye, atau kemitraan serta jadikan mereka sebagai saluran komunikasi tambahan jika memungkinkan.

Secara keseluruhan, pemetaan relasi kuasa yang dilakukan menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor dan peran aktif dari semua stakeholder sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan

dalam pemulihan stunting di Kota Makassar. Sinergi antara pemangku kepentingan kunci, context setter, subject, dan crowd menjadi faktor penentu dalam penanganan isu kesehatan publik ini. Dalam rangka mengoptimalkan hasil, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara semua pihak agar program-program yang dicanangkan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.